

LAMPIRAN

Daftar pertanyaan untuk museum MP:

1. Ada berapa macam koleksi dan jumlah tiap macam koleksi di museum MP?
2. Bagaimana proses pengakuan aset koleksi museum MP?
3. Bagaimana cara penilaian aset koleksi dalam museum MP?
4. Adakah standar yang mengatur mengenai pengakuan aset koleksi dalam museum MP?
5. Lembaga apa saja yang terkait dalam penilaian aset dalam museum?
6. Bagaimana pelaporan aset koleksi dalam laporan keuangan museum MP?
7. Adakah data pembandingan?
8. Bagaimanakah struktur organisasi museum MP ?
9. Apa saja *job description* dari masing-masing pejabat yang ada dalam museum MP?

Daftar Pertanyaan untuk Art Shop dan BP3 :

1. Bagaimana penentuan harga dari tiap macam barang koleksi ?
2. Dasar apakah yang dipakai untuk menentukan harga barang tersebut ?

BUKU I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2008**

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2007**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA**

Nomor : 112/R/XVIII.SBY/05/2008
Tanggal : 25 Mei 2008

DAFTAR ISI

	Hal
OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
A. NERACA.....	6
B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN... ..	8
C. LAPORAN ARUS KAS.....	10
D. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
1. Pendahuluan.....	13
2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD.....	18
3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.....	29
4. Kebijakan Akuntansi.....	45
5. Penjelasan Atas Rekening-rekening Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.....	54
6. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan... ..	84
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	
1. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	91
2. Tujuan Pemeriksaan.....	91
3. Sasaran Pemeriksaan... ..	91
4. Standar Pemeriksaan.....	91
5. Metode Pemeriksaan.....	92
6. Waktu Pemeriksaan... ..	92
7. Objek Pemeriksaan... ..	93
8. Kendala Pemeriksaan.....	93



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Kepada para pengguna laporan keuangan,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Neraca Pemerintah Propinsi Jawa Timur per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Berdasarkan pemeriksaan, diketahui bahwa:

1. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 1, pembentukan Dana Cadangan Murni tidak sesuai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembentukan Dana Cadangan. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan dana cadangan sebesar Rp41.500.000.000,00 pada tahun 2002 untuk jaminan pinjaman kepada Bank Jatim dan penggunaan dana cadangan murni untuk membentuk dana cadangan pilkada pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp65.000.000.000,00 dan Rp67.713.876.948,00. Hal tersebut mengakibatkan saldo Dana Cadangan Murni sebesar Rp50.562.937.305,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

2. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 2, pembebanan realisasi bantuan rehabilitasi sekolah negeri melalui pos bantuan sosial sebesar Rp67.350.000.000,00 tidak tepat. Hal tersebut mengakibatkan saldo akun Bantuan Sosial disajikan lebih tinggi (*over stated*) dan saldo akun Bantuan Keuangan disajikan lebih rendah (*under stated*) masing-masing sebesar Rp67.350.000.000,00;
3. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 3, penyajian informasi keuangan dana bergulir sebesar Rp379.995.700.850,00 kurang memadai. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 tidak menggambarkan secara lengkap seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tersebut;
4. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 4, pengeluaran anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp15.520.406.207,00 lebih tepat direalisasikan dalam belanja bantuan keuangan dan belanja barang dan jasa. Pengeluaran sebesar Rp9.316.418.437,00 untuk membiayai pelayanan pasien Askes Masyarakat Miskin yang tidak ditanggung oleh PT. Askes lebih tepat jika direalisasikan melalui Belanja Subsidi. Pengeluaran sebesar Rp714.388.250,00 untuk perbaikan ruas jalan dan bahu jalan lebih tepat jika direalisasikan melalui Belanja Barang dan Jasa Dinas Bina Marga. Pengeluaran sebesar Rp3.427.355.000,00 untuk Peningkatan Jalan Alternatif Lintas Timur lebih tepat jika direalisasikan melalui Belanja Bantuan Keuangan karena bencana alam terjadi pada tahun 2006 dan Ruas Jalan merupakan aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pengeluaran sebesar Rp979.372.320,00 untuk pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada jalur alternatif lebih tepat jika direalisasikan pada belanja barang dan jasa Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengeluaran sebesar Rp1.082.872.000,00 untuk musibah kebakaran Pasar Turi lebih tepat jika direalisasikan melalui Belanja Bantuan Keuangan. Hal tersebut mengakibatkan laporan keuangan terutama penyajian belanja tidak terduga tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau riil;
5. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 5, realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp24.646.471.050,00 digunakan untuk membiayai kegiatan 14 SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut mengakibatkan saldo akun belanja bantuan sosial disajikan lebih tinggi sebesar Rp24.646.471.050,00 dan saldo akun belanja pada masing-masing SKPD disajikan lebih rendah;
6. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 6, Belanja Bantuan Sosial Kepada Instansi/Lembaga Daerah/Masyarakat belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp248.827.033.246,00. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran belanja bantuan sosial sebesar Rp248.827.033.246,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;

7. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 8, realisasi belanja untuk pengadaan Aset Tak Berwujud Berupa Software/Sistem Aplikasi Komputer minimal sebesar Rp9.294.608.500,00 Tidak dicatat dan Tidak Disajikan Dalam Neraca. Hal tersebut mengakibatkan saldo akun Aset Tak Berwujud tidak menyajikan kondisi sebenarnya dan aset tak berwujud senilai Rp9.294.608.500,00 belum disajikan dalam neraca;
8. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 9, Aset Tetap yang dimiliki pihak lain sebesar Rp225.421.673.283,00 tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2007. Hal tersebut mengakibatkan saldo akun Aset Tetap senilai Rp225.421.673.283,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;
9. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 10, Aset tetap hasil pengadaan APBN sebesar Rp2.910.023.050,00 diakui di Neraca dan Aset Tetap senilai Rp2.503.589.040,00 tidak dapat ditelusuri. Hal tersebut mengakibatkan Aset Tetap di neraca sebesar Rp2.503.589.040,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;
10. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 11, Aset Tetap senilai Rp5.908.341.465,00 tidak dapat ditelusuri. Adanya selisih antara Rekapitulasi Pengelolaan Barang dari SKPD lain pada Laporan Penjelasan Penambahan Aset dalam Mutasi Barang dengan Jumlah Aset Tetap yang dipergunakan SKPD lain pada Laporan Penjelasan Realisasi Belanja Modal Biro Perlengkapan dan Administrasi Aset sebesar Rp2.203.988.650,00. Adanya aset pengelolaan dari SKPD lain sebesar Rp3.067.940.170,00 yang tidak diketahui SKPD yang menyalurkan aset tersebut. Adanya selisih antara jumlah Aset Tetap hasil pengadaan Biro Perlengkapan dan Administrasi Aset dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan sebesar Rp636.412.645,00. Hal tersebut mengakibatkan saldo akun aset tetap sebesar Rp5.908.341.465,00 tidak dapat diyakini kewajarannya;
11. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 12, Pencatatan Aset Tetap hasil pengadaan Dinas Permukiman tidak dilaksanakan secara tertib serta Belanja Modal digunakan untuk Belanja Non Modal sebesar Rp45.600.614.000,00. Hal tersebut mengakibatkan saldo akun belanja modal disajikan lebih tinggi sebesar Rp45.600.614.000,00, saldo akun belanja hibah disajikan lebih rendah sebesar Rp45.257.914.000,00, dan saldo akun belanja barang disajikan lebih rendah sebesar Rp342.700.000,00;
12. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 13, Tanah seluas 10.524.378 m² dan senilai Rp1.317.148.931.282,00 belum bersertifikat atas nama Pemerintah Daerah dan tidak ada kejelasan mengenai bukti kepemilikannya. Hal tersebut mengakibatkan aset tetap berupa tanah senilai Rp1.317.148.931.282,00 tidak dapat diyakini kewajarannya serta melemahkan posisi Pemerintah Daerah jika sewaktu-waktu terjadi sengketa tanah dengan pihak lain;
13. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 15, Laporan Keuangan belum menyajikan pengelolaan keuangan Unit Paviliun dan Depo Farmasi pada RSUD Dr Saiful Anwar. Hal tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan tidak menggambarkan kondisi riil posisi keuangan yang dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur minimal pendapatan sebesar Rp17.842.307.437,00 dan belanja sebesar

Rp12.457.180.208,00 serta tidak terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah;

14. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 16, Pendapatan bunga deposito dana cadangan sebesar Rp28.492.471.087,75 belum disajikan dalam pendapatan daerah maupun pembiayaan pengeluaran. Hal tersebut mengakibatkan saldo akun Lain-lain PAD yang Sah disajikan lebih rendah dan saldo akun Pembiayaan pengeluaran-pembentukan dana cadangan disajikan lebih tinggi masing-masing sebesar Rp28.492.471.087,00;
15. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 17, Pengelolaan Dana Pinjaman tidak tepat dan pembayaran bunga beserta pokok pinjaman sebesar Rp8.670.875.000,00 tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan kinerja daerah dari pengelolaan pinjaman tidak dapat diukur secara akurat. Selain itu, penyajian akun belanja bunga disajikan lebih rendah sebesar Rp1.741.626.463,00, saldo akun pembiayaan pengeluaran disajikan lebih rendah sebesar Rp6.929.248.537,00, saldo akun bagian lancar utang jangka panjang disajikan lebih rendah sebesar Rp4.730.000.000,00, dan saldo akun utang jangka panjang disajikan lebih rendah sebesar Rp10.320.000.000,00;
16. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 18, Penyertaan Modal dengan kepemilikan di atas 20% tidak dicatat menggunakan metode ekuitas. Hal tersebut mengakibatkan nilai investasi yang disajikan di neraca tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Sebagaimana dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Nomor 19, Dua puluh lima bidang tanah seluas 47.039 m² yang dimiliki Pemda disajikan dengan nilai di bawah Rp5.000,00. Hal tersebut mengakibatkan aset tetap berupa 25 bidang tanah di neraca tidak disajikan secara wajar.

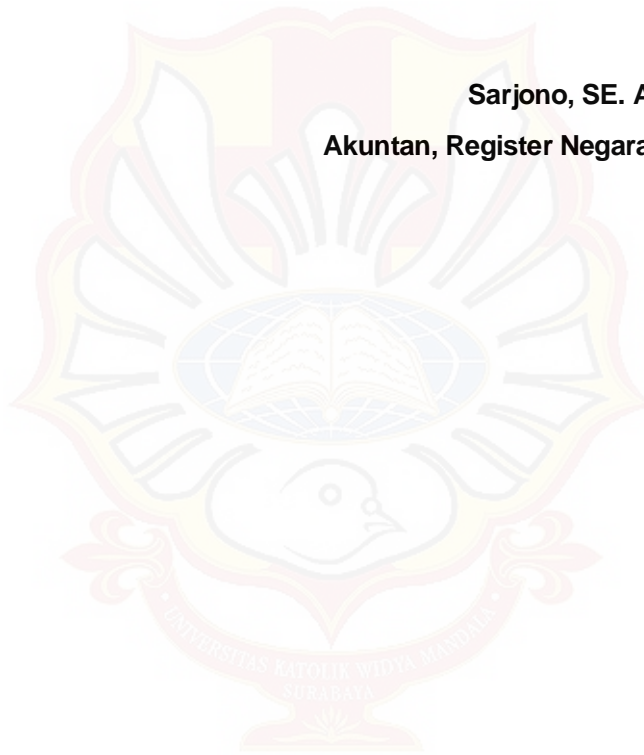
Menurut pendapat BPK RI, karena hal yang disebut pada paragraf sebelumnya, laporan keuangan yang disebut di atas tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Surabaya, 25 Mei 2008

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN BPK RI DI SURABAYA
PENANGGUNG JAWAB PEMERIKSAAN,**

**Sarjono, SE. Ak.
Akuntan, Register Negara No. D-25873**



LAPORAN KEUANGAN POKOK

A. NERACA

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2007 dan 2006

Uraian	2007 (Rp)	2006 (Rp)
ASET		
ASET LANCAR	1.487.069.415.128,24	995.997.055.946,24
Kas	1.281.755.295.429,82	847.309.400.090,89
Kas di Kas Daerah	1.237.638.636.382,43	810.854.071.190,99
Kas di Rekening Fungsional Rumah Sakit	35.256.020.830,79	34.237.168.219,90
Kas di Bendahara Penerimaan	271.663.646,60	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	8.588.974.570,00	2.218.160.680,00
Investasi Jangka Pendek		
Piutang	153.269.178.288,00	102.980.974.975,35
Piutang Pajak	96.996.693.111,00	100.967.765.949,00
Piutang Retribusi	55.149.662.819,00	131.675.292,35
Piutang Dana Bagi Hasil	-	-
Piutang Dana Alokasi Umum	-	-
Piutang Dana Alokasi Khusus	-	-
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	990.653.996,00	1.169.375.028,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	84.278.650,00	212.671.300,00
Piutang Lain - lain	47.889.712,00	499.487.406,00
Persediaan	52.044.941.410,42	45.706.680.880,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	1.290.066.359.350,00	1.035.046.059.350,00
Investasi NonPermanen	379.995.700.850,00	320.232.700.850,00
Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-
Investasi Dana Bergulir	379.995.700.850,00	320.232.700.850,00
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
Investasi Permanen	910.070.658.500,00	714.813.358.500,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	910.070.658.500,00	714.813.358.500,00
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	-	-
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	-	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-
ASET TETAP	23.699.914.950.542,00	23.250.187.871.653,00
Tanah	12.382.351.961.109,00	12.288.001.613.170,00
Peralatan dan Mesin	1.453.395.570.350,00	1.316.300.027.564,00
Gedung dan Bangunan	1.080.020.130.941,00	1.042.091.300.776,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.601.027.328.985,00	8.512.764.273.156,00
Aset Tetap Lainnya	11.236.833.713,00	10.939.523.032,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	171.883.125.444,00	80.091.133.955,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-

Uraian	2007 (Rp)	2006 (Rp)
DANA CADANGAN	479.055.408.392,75	328.276.814.248,00
Dana Cadangan	479.055.408.392,75	328.276.814.248,00
ASET LAINNYA	11.393.331.210,00	10.000.000.000,00
BOT	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.393.331.210,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tak Berwujud	-	-
Aset Lain - lain	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
JUMLAH ASET	26.967.499.464.622,99	25.619.507.801.197,20
KEWAJIBAN	176.210.197.999,28	153.181.915.618,69
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	169.651.146.773,28	153.181.915.618,69
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.530.992.927,00	-
Utang Bunga	524.831.946,00	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	3.475.168.052,00	3.349.395.216,93
Utang Belanja	357.489.502,00	16.067.194.266,00
Utang Bagi Hasil Pajak	157.176.933.046,81	130.456.718.574,51
Utang Bagi Hasil Bukan Pajak	3.959.254.211,08	3.302.331.022,86
Utang Lain-lain	2.626.477.088,39	6.276.538,39
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	6.559.051.226,00	-
Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	6.559.051.226,00	-
EKUITAS DANA	26.791.289.266.623,70	25.466.325.885.578,60
Ekuita Dana Lancar	1.317.418.268.354,96	842.815.140.327,55
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1.281.483.631.783,22	847.309.400.090,89
Pendapatan yang Ditangguhkan	271.663.646,60	-
Cadangan Piutang	153.269.178.288,00	102.980.974.975,35
Cadangan Persediaan	52.044.941.410,42	45.706.680.880,00
Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(169.651.146.773,28)	(153.181.915.618,69)
Ekuitas Dana Investasi	24.994.815.589.876,00	24.295.233.931.003,00
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	1.290.066.359.350,00	1.035.046.059.350,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	23.699.914.950.542,00	23.250.187.871.653,00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	11.393.331.210,00	10.000.000.000,00
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(6.559.051.226,00)	-
Ekuitas Dana Cadangan	479.055.408.392,75	328.276.814.248,00
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	479.055.408.392,75	328.276.814.248,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	26.967.499.464.622,99	25.619.507.801.197,20

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 DESEMBER 2007

Nomor Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
4	PENDAPATAN	5.133.847.177.458,00	5.940.048.022.273,61	115,70
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.555.497.177.458,00	4.164.250.659.986,61	117,12
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.143.250.000.000,00	3.574.886.241.760,00	113,73
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	229.913.773.500,00	261.100.680.457,77	113,56
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	97.544.906.958,00	99.510.836.622,96	102,02
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.788.497.000,00	228.752.901.125,88	269,79
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.564.115.000.000,00	1.755.896.026.169,00	112,26
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.564.115.000.000,00	1.755.896.026.169,00	112,26
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	452.000.000.000,00	641.893.164.721,00	142,01
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	21.000.000.000,00	22.847.861.448,00	108,80
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.091.155.000.000,00	1.091.155.000.000,00	100,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus			
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	14.195.000.000,00	19.901.336.118,00	140,20
4.3.1	Pendapatan Hibah	14.195.000.000,00	19.901.336.118,00	140,20
	Jumlah	5.133.847.177.458,00	5.940.048.022.273,61	115,70
5	BELANJA	5.739.064.728.064,00	5.267.845.347.892,28	91,79
5.1	BELANJA OPERASI	3.519.937.236.357,00	3.263.437.620.434,71	92,71
5.1.1	Belanja Pegawai	1.291.809.389.682,00	1.210.568.135.064,00	93,71
5.1.2	Belanja Barang	1.357.553.787.621,00	1.194.585.857.398,00	88,00
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	868.574.059.064,00	856.283.627.972,71	98,58
5.2	BELANJA MODAL	703.050.629.137,00	640.504.302.197,57	91,10
5.2.1	Belanja Tanah	70.625.598.263,00	62.055.742.229,00	87,87
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	144.409.743.598,00	129.212.705.629,00	89,48
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	284.270.514.329,00	250.394.635.516,00	88,08
5.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan	198.862.079.387,00	194.154.071.715,57	97,63
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.523.484.000,00	2.417.708.183,00	95,81
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	2.359.209.560,00	2.269.438.925,00	96,19
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	56.063.183.400,00	25.002.442.773,00	44,60
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	56.063.183.400,00	25.002.442.773,00	44,60

Nomor Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
5.4	TRANSFER	1.460.013.679.160,00	1.338.900.982.487,00	91,70
5.4.1	Transfer/ bagi hasil pendapatan ke Kabupaten/Kota	1.452.656.631.160,00	1.334.276.267.687,00	91,85
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	7.357.048.000,00	4.624.714.800,00	62,86
	Jumlah	5.739.064.728.064,00	5.267.845.347.892,28	91,79
	Surplus/(Defisit)	(605.217.550.606,00)	672.202.674.381,33	(111,07)
6	PEMBIAYAAN	606.610.881.816,00	606.757.468.184,89	100,02
6.1	PENERIMAAN DAERAH	915.023.277.033,00	915.169.863.401,89	100,02
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	847.309.400.090,00	847.306.591.208,89	99,99
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	67.713.876.943,00	67.713.876.943,00	100,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
6.1.4	Penerimaan Piutang Daerah	-	149.395.250,00	-
	Jumlah	915.023.277.033,00	915.169.863.401,89	100,02
6.2	PENGELUARAN DAERAH	308.412.395.217,00	308.412.395.217,00	100,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	190.000.000.000,00	190.000.000.000,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	118.263.000.000,00	118.263.000.000,00	100,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	149.395.217,00	149.395.217,00	100,00
	Jumlah	308.412.395.217,00	308.412.395.217,00	100,00
	Pembiayaan Netto	606.610.881.816,00	606.757.468.184,89	100,02
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1.393.331.210,00	1.278.960.142.566,22	

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini

C. LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 DESEMBER 2007 dan 2006

Uraian	2007 (Rp)	2006 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Pajak Daerah	3.574.886.241.780,00	3.256.903.357.578,00
Retribusi Daerah	56.792.023.080,88	66.925.782.316,57
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	99.510.836.622,96	61.252.024.389,16
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	220.082.420.065,88	119.767.732.832,12
Dana Bagi Hasil Pajak	641.893.164.721,00	526.226.576.624,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	22.847.861.448,00	29.748.527.969,55
Dana Alokasi Umum	1.091.155.000.000,00	820.773.000.000,00
Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Dana Penyesuaian	0,00	124.633.385,00
Pendapatan Hibah	19.901.336.118,00	23.111.351.335,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	5.727.068.883.836,72	4.904.832.986.429,40
Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	1.136.408.311.825,00	960.388.247.788,00
Belanja Barang dan Jasa	1.080.067.901.520,00	1.607.514.775.466,00
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	2.000.000.000,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	854.686.634.603,71	0,00
Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	1.334.276.267.687,00	1.389.540.714.193,00
Belanja Bantuan Keuangan	4.624.714.800,00	357.865.832.930,00
Belanja Tidak Terduga	25.002.442.773,00	24.802.918.086,00
Jumlah	4.437.066.273.208,71	4.340.112.488.463,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.290.002.610.628,01	564.720.497.966,40
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan Penjualan Atas Tanah	3.437.652.807,00	206.561.349,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	34.253.000,00	113.720.870,00

Uraian	2007 (Rp)	2006 (Rp)
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	56.760.000,00	49.570.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	3.528.665.807,00	369.852.219,00
Arus Keluar Kas		
Belanja Tanah	62.055.742.229,00	90.112.411.012,00
Belanja Peralatan dan Mesin	111.154.689.684,00	211.351.557.059,00
Belanja Gedung dan Bangunan	249.684.271.166,00	65.886.584.251,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	195.717.562.384,57	145.872.901.964,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.217.114.183,00	3.685.942.063,00
Belanja Aset Lainnya	1.520.883.900,00	84.712.325.754,00
Jumlah	622.350.263.546,57	601.621.722.103,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(618.821.597.739,57)	(601.251.869.884,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Masuk Kas		
Pencairan Dana Cadangan	67.713.876.943,00	0,00
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	154.279.027,54
Penerimaan Kembali Pinjaman	149.395.250,00	0,00
Penerimaan Piutang	0,00	0,00
Jumlah	67.863.272.193,00	154.279.027,54
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	190.000.000.000,00	145.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	118.263.000.000,00	213.775.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	149.395.217,00	154.279.029,00
Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Jumlah	308.412.395.217,00	358.929.279.029,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(240.549.123.024,00)	(358.775.000.01,46)

Uraian	2007 (Rp)	2006 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan sisa Kas PK tahun lalu	-	18.929.532.809,00
Penerimaan sisa UP/GU/TU tahun berjalan	-	47.560.445.121,00
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	-	-
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	164.316.039.187,00	139.092.574.542,00
Jumlah	164.316.039.187,00	205.582.552.472,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran SP2D UP/GU/TU	-	49.778.605.801,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	164.316.039.187,00	139.092.574.52,00
Jumlah	164.316.039.187,00	188.871.180.343,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran	-	16.711.372.129,00
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	430.631.889.864,44	(378.594.999.790,06)
Saldo Awal Kas di BUD	811.678.900.660,99	1.189.449.070.981,05
Kas di Kas Daerah	810.854.071.190,99	
Kas di Bendahara Pengeluaran	824.829.470,00	
Saldo Akhir Kas di BUD	1.242.310.790.525,43	813.072.231.870,99
Kas di Kas Daerah	1.237.638.636.382,43	810.854.071.190,99
Kas di Bendahara Pengeluaran	4.672.154.143,00	2.218.160.680,00
Saldo Akhir Kas di Rekening Fungsional Rumah Sakit	35.256.020.830,79	34.237.168.219,90
Kas di Bendahara Pengeluaran (Belum Setor)	3.916.820.427,00	
Sisa Askeskin di RSUD Saiful Anwar	2.385.827.500,00	
PFK di Bendahara Pengeluaran	1.530.992.927,00	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	271.663.646,60	-
Saldo Akhir Kas	1.281.755.295.429,82	847.309.400.090,89

Catatan Atas Laporan Keuangan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Utama ini.

D. Catatan Atas laporan Keuangan

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Wujud nyata dari perubahan paradigma yang menjadikan pembangunan sebagai acuan kerja pemerintahan ke paradigma pelayanan dan pemberdayaan sebagai landasan kerja pemerintah adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satu perubahan mendasar dari paradigma tersebut adalah adanya reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar dalam bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, yang bermuara pada terciptanya dinamika serta corak pembangunan baru di daerah.

Implementasi reformasi di bidang pengelolaan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara ini dijabarkan aturan-aturan pokok yang merupakan pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

- 1) akuntabilitas berorientasi pada hasil
- 2) profesionalitas
- 3) proporsionalitas
- 4) keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
- 5) pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Tidak berhenti hanya sampai di situ, selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengamanatkan pula agar segera disusun standar akuntansi pemerintahan. Menindaklanjuti semua peraturan tersebut serta perlunya pedoman yang mengatur kesamaan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan teknisnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaporan keuangan dibedakan menjadi 2 (dua) entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur menginformasikan posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode pelaporan, selain itu juga berfungsi membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Membantu dalam menilai kondisi keuangan, efektif dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelaksanaan realisasi anggaran serta menentukan ketaatan terhadap kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

b. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4, yaitu:

- 1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sebagai upaya perwujudan *Good Governance* serta taat asas, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dalam hal pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas.

Maksud penyusunan Laporan Keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan untuk melaksanakan asas efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

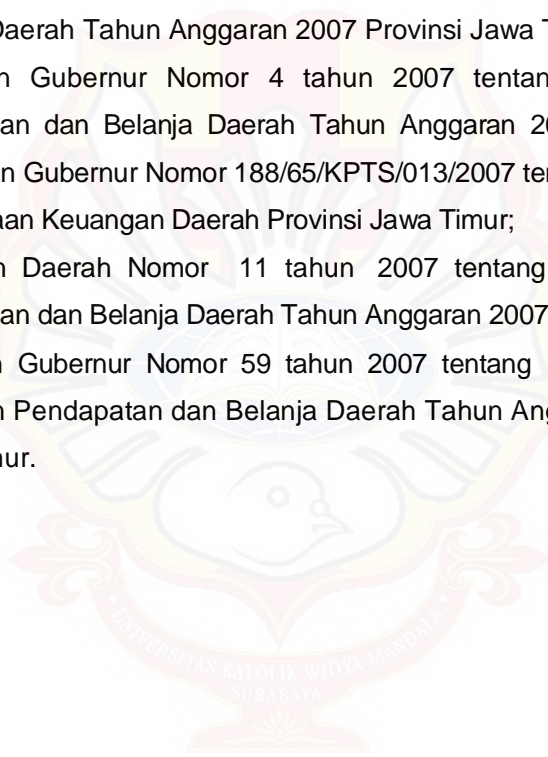
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;

Maka berdasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan yang telah disampaikan sebelumnya, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Provinsi Jawa Timur dan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Provinsi Jawa Timur;

c. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan :

- 1) UUD 1945;
- 2) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 5) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 April 2007 Nomor: 900/316/BAKD/2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 13) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Provinsi Jawa Timur;
- 14) Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Provinsi Jawa Timur;
- 15) Keputusan Gubernur Nomor 188/65/KPTS/013/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
- 16) Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Provinsi Jawa Timur;
- 17) Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Provinsi Jawa Timur.



2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD.

a. Ekonomi Makro

Besaran-besaran makro ekonomi sangat fundamental dalam rangka penyusunan APBD. Besaran seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, inflasi yang tidak dapat dikendalikan dengan kebijakan harus diformulasikan menjadi asumsi - asumsi penting. Dalam penyusunan APBD 2007, asumsi - asumsi penting yang ditetapkan antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% dengan inflasi dibawah 2 digit dan nilai tukar rupiah dibawah ambang batas psikologis Rp10.000,00. Dari penetapan asumsi ekonomi makro tersebut, pada akhir tahun 2007, pertumbuhan ekonomi berdasarkan angka sangat sementara BPS dan belum divalidasi mencapai 6,02%. Sedangkan inflasi sampai dengan akhir tahun 2007 (kumulatif) tercatat sebesar 6,48 % dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat mencapai Rp9.200,00.

Capaian makro ekonomi dari asumsi yang ditetapkan pada penyusunan APBD 2007, sebenarnya tidak terdapat kondisi ekstrim sebagaimana pernah terjadi pada tahun 2006 yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM pada Oktober 2005. Sedikit pelambatan dari target 2007 sebesar 6,1% akan dilakukan justifikasi kembali dengan kegiatan validasi standar BPS. Oleh karena itu substansi laporan ini akan mengalami perkembangan kedepan khususnya terkait besaran pertumbuhan ekonomi 2007. Sedangkan untuk inflasi dan nilai tukar rupiah yang sepenuhnya dikendalikan oleh otoritas moneter, nampaknya tidak terlalu ekstrem fluktuatif dan cenderung stabil, hanya pada momen hari-hari tertentu seperti bulan Juni dan Juli awal anak sekolah memasuki tahun ajaran baru, hari raya Idul Fitri, Natal dan Tahun baru beberapa kelompok barang seperti pangan dan sandang mengalami inflasi yang agak tinggi.

b. Kebijakan Keuangan

Kebijakan di bidang keuangan daerah meliputi 2 (dua) aspek penting yaitu kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah (*revenue policy*) dan kebijakan di bidang pembelanjaan keuangan daerah (*expenditure policy*).

Kebijakan di bidang keuangan daerah tersebut mempunyai nilai yang sama penting dan masing-masing harus dapat bersinergi. Idealnya *expenditure policy* adalah merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya *revenue policy* dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran.

Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut maka APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan di bidang pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan. Kebijakan tersebut dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Agar APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2007 dapat mengimplementasikan Visi - Misi Jawa Timur serta mencerminkan kondisi aktual saat ini dan sebagai prediksi ke depan, maka tema APBD Tahun Anggaran 2007 adalah :

“Revitalisasi pembangunan Jawa Timur dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan kemandirian ekonomi di bidang pangan dan energi menuju kemandirian industri”

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya, yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam melakukan pungutan terhadap pos-pos pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan berprinsip pada pelayanan yang optimal serta tidak memberatkan masyarakat.

Pada tahun 2007 ini dari sektor pajak langsung yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diproyeksikan terdapat kenaikan sebesar 8% - 12% dari realisasi tahun 2006, sedangkan dari sektor pajak tidak langsung yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan bagian Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pertumbuhannya menyesuaikan kondisi perekonomian dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Diprediksikan pada tahun 2007, kekuatan pendapatan daerah akan naik 8,90% atau Rp5,096 trilyun, yang merupakan akumulasi dari asumsi-asumsi sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah akan naik terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 8-12%.
- 2) Dana APBN yang ditransfer ke daerah (Dana Bagi Hasil, DAU, DAK) sebesar 27% dari penerimaan negara. Sedangkan kondisi belanja publik dari APBN untuk tahun 2007 secara nasional naik 12,8% atau Rp26,1 Trilyun dari pagu definitif tahun 2006 yang sebesar Rp204,2 Trilyun menjadi Rp230,3 Trilyun (pagu indikatif 2007).

- 3) Dengan asumsi dana perimbangan akan mengalami kenaikan yang sama dengan kenaikan dana APBN 2007 sebesar 12,8%, dana perimbangan diproyeksikan naik 14,56% yang berasal dari proyeksi kenaikan dana Bagi Hasil/non pajak sebesar 25,57% dan DAU sebesar 10%, sedangkan dari kenaikan Lain-lain Pendapatan Yang Sah naik sebesar 9,84%.
- 4) Proyeksi pendapatan daerah tahun 2007 diasumsikan naik dari target pendapatan tahun 2006.

Prediksi kekuatan pendapatan daerah untuk tahun 2007 ini lebih tinggi dari proyeksi sebagaimana substansi RPJMD 2006-2008 yang berdasarkan total pendapatan Provinsi Jawa Timur 2006-2008 adalah Rp3,4 Trilyun (Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2006-2008 pada Bab IV Sub Bab Proyeksi Keuangan Jawa Timur). Perbedaan ini tentu saja harus dijustifikasi dengan kekuatan APBD 2006 yang mencapai Rp4,6 Trilyun.

Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dalam aspek pembiayaan diarahkan agar tercipta akurasi, efisien, efektifitas dan profitabilitas.

Pada komponen belanja Provinsi Jawa Timur terdapat dana-dana dari APBN (diluar DAU dan DAK), yang jumlah alokasinya pada tahun 2006 (sesuai dengan data dari Departemen Keuangan) sebesar Rp11.841.127.139,72 yang tersebar pada instansi vertikal maupun otonom termasuk belanja ex rutin. Dengan asumsi bahwa plafon per provinsi akan mengalami kenaikan yang sama dengan kenaikan pagu indikatif nasional sebesar 12,8% maka alokasi dana APBN 2007 ke Jawa Timur diperkirakan sebesar Rp13.356.791.697,86.

Sebagai sebuah kebijakan publik, maka kebijakan umum APBD yang ada pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang tersusun dalam APBD 2007 adalah:

1) Pendapatan

- a) Peningkatan target pendapatan daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi, dan *coverage ratio* yang ada.
- b) Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
- c) Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah.

2) Belanja

- a) Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan pangan.
- b) Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil melalui fasilitasi UKM di semua sektor terutama dalam rangka menuju kemandirian pangan dan energi.
- c) Melanjutkan proyek-proyek strategis sesuai tahapan.
- d) Penanganan bencana alam dan pasca bencana alam. Belanja penanganan bencana alam dan pasca bencana alam dialokasikan dengan pola "*plotting* mengambang" yang sewaktu-waktu dapat dibelanjakan. Belanja dari pola *plotting* mengambang jika tidak dapat diserap karena tidak terjadi bencana, sisa lebih bukan tidak dihitung sebagai kerangka prestasi kerja.
- e) Mengakomodasikan dinamika masyarakat yang berkembang.
- f) Memenuhi prinsip keadilan tidak hanya terkonsentrasi pada lokus tertentu serta memperhatikan aspirasi masyarakat.
- g) Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- h) Peningkatan kinerja hasil (*out come*) yang nyata dan pada tahap awal diperlukan "*pilot project*" untuk mendukung keberhasilan implementasi perencanaan.

3) Pembiayaan

Meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas. Adanya kebijakan di bidang pengelolaan keuangan merupakan pijakan awal dalam melaksanakan seluruh kegiatan baik berupa pencapaian target di bidang pendapatan maupun aktivitas operasional belanja yang merupakan wujud nyata kinerja dari setiap unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Realisasi dari kebijakan dimaksud pada akhirnya akan bermuara pada pertanggungjawaban realisasi APBD tahun anggaran 2007. Pengaruh yang signifikan akan nampak pada laporan arus kas dan neraca daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada akun aset lancar akan mengalami peningkatan, begitu juga pada posisi belanja yang mengalami peningkatan dibanding tahun anggaran 2006, dan pada akhirnya akan mempengaruhi aktivitas arus kas masuk yang juga akan mengalami peningkatan.

c. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Dengan dasar tersebut dapat disampaikan bahwa kewenangan untuk mengatur kebijakan fiskal merupakan wilayah kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan pemerintah Provinsi tidak dapat mengkondisikan daerah dengan kebijakan tersebut dikarenakan bukan merupakan kewenangannya.

Sebagai penjelasan terhadap fiskal dari kebijakan pemerintah pusat tersebut dapat disampaikan beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang dipakai dalam penyusunan RAPBN tahun 2007 yang akan menjadi patokan bagi seluruh kebijakan ekonomi pemerintah daerah sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi (%) = 6,2-6,4;
- 2) Inflasi (%) = 5,0-7,0;
- 3) Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$1) = 9.000-9.200;
- 4) Tingkat Suku Bunga SBI-3 Bulan (%) = 8,0-9,0;
- 5) Harga Minyak Indonesia (US\$/barel) = 55-58;
- 6) Lifting (MBCD) = 1,000;
- 7) Produksi Minyak (MBCD) = 1,045

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal sebagai landasan untuk penyusunan RAPBN tahun anggaran 2007. Strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2007 akan tetap diarahkan pada dua langkah mendasar. *Pertama*, melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal guna memantapkan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*). Hal ini akan diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran pada kisaran 0,5-0,7 persen terhadap PDB untuk menjaga tingkat resiko dan *eksposure* utang pemerintah pada tingkat yang aman, tanpa menutup kebutuhan

untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Upaya pengelolaan anggaran tersebut akan dilakukan melalui langkah-langkah peningkatan penerimaan negara, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja negara, seraya tetap mengupayakan stimulus perekonomian dengan *Pro Growth, Employment Creation, dan Poverty Alleviation* secara bertahap dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran. *Kedua*, merumuskan strategi pembiayaan anggaran yang tepat dan terkendali (*manageable*) agar terjadi penurunan stok utang pemerintah dan rasionya terhadap PDB. Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pokok kebijakan fiskal RAPBN 2007 tersebut, dalam tahun 2007 akan dilakukan langkah-langkah kebijakan pokok di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

d. Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter dilaksanakan untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Kebijakan moneter merupakan kewenangan dari pemerintah Pusat dalam hal Bank Indonesia yang mempunyai tugas untuk menjaga tingkat stabilitas moneter dalam negeri.

e. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Program Entitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008 merupakan acuan didalam penetapan target kinerja menengah dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun dengan memobilisasi potensi-potensi yang ada. Selanjutnya target-target tersebut dijabarkan kedalam target-target tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan daerah. Untuk tahun 2007, berdasarkan dokumen RKPD tahun 2007, Pemerintah Provinsi menetapkan target kinerja sebagai berikut:

MATRIK PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN		
TAHUN		
NO	INDIKATOR KINERJA	2007
I.	AGENDA PENINGKATAN KESALEHAN SOSIAL DALAM BERAGAMA	
	1. Rasio Angka Perceraian Terhadap Jumlah Rumah Tangga	0,0020
	2. Pemakai Narkoba (% Penurunan)	(2)
	3. Indeks Komposit kriminalitas yang dominan (2005=100)	97
II.	AGENDA PENINGKATAN AKSESIBILITAS TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	
	1. Angka Buta Huruf penduduk umur 10 - 44 tahun (%)	7,94
	2. Angka Partisipasi Sekolah menurut tingkat pendidikan (%):	
	a. SD-MI	99,63
	b. SLTP-MTs	85,71
	c. SLTA-MA	62,02
	3. Rasio murid SMK terhadap murid SMU	0,70
	4. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	37,00
	5. Angka Harapan Hidup (tahun)	67,55
	6. Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	304
	7. Prevalensi kurang Gizi pada anak (%)	20,00
	8. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)	84,00
III.	AGENDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, PERBAIKAN IKLIM KETENAGA KERJAAN DAN MEMACU KEWIRAUSAHAAN	
	1. Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5,4
	2. Pemenuhan kebutuhan Pangan (Skor Pola Pangan Harapan)	78,2
	3. ILOR	0,054

	4. Persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk (%) 5. Peranan APBD terhadap PDRB (%) 6. Indeks Jumlah Kecelakaan Kerja (2005=100)	17,00 1,50 97,00
IV.	AGENDA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1. Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 (%) 2. PDRB Per Kapita (ribu Rupiah) 3. Indeks Daya Beli (Tahun 2000=100) 4. Indeks Disparitas Wilayah 5. Nilai Tukar Petani (NTP) 2002 =100 6. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 7. Peningkatan Nilai Tambah UKM dalam PDRB (%) 8. Indeks Pembangunan Manusia 9. ICOR 10. Pertumbuhan Penduduk (%)	6,10 8.650 127 101,5 106,33 107 62,00 65,57 4,80 1,100
V.	AGENDA OPTIMALISASI PENGENDALIAN SDA, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENATAAN RUANG 1. Kualitas air sungai (% terhadap parameter kunci dalam baku mutu) 2. Kualitas udara ambien di perkotaan (% terhadap baku mutu udara ambien) 3. Pengendalian limbah B3 (% terhadap total potensi limbah B3 yang dihasilkan) 4. Lahan kritis Tahura R.Suryo (Ha) 5. Lahan Kritis Non Tahura R.Suryo di Jawa Timur (Ha)	15,00 20,00 20,00 12.000 400.000

VI.	AGENDA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, SUPREMASI HUKUM DAN HAM 1. Indeks Korban Kejahatan (2005=100) 2. Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%) 3. Indeks Korban Kekerasan (2005=100) 4. Indeks Perkelahian antar pelajar (2005=100) 5. Indeks Kerusakan berlatarbelakang SARA (2005=100) 6. Indeks Pertikaian antar aparat keamanan (2005=100) 7. Indeks Kerusakan berlatar belakang politik (2005=100) 8. Indeks Konflik antar nelayan (2005=100)	100 (2) 98 98 98 90 90 90
VII.	AGENDA REVITALISASI PROSES DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MELALUI REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 1. Efektivitas Perda yang dihasilkan 2. Penanganan pengaduan di DPRD Jawa Timur 3. Rasio jumlah dan besar kerugian negara terhadap APBD (%) 4. Penanganan terhadap Pengaduan Pelayanan Publik	meningkat meningkat 0,330 meningkat

Sebagai akibat kenaikan harga minyak dunia relatif tinggi, maka pemerintah mengurangi subsidi BBM yang berakibat pada kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2005. Kebijakan ini tentu berpengaruh pada situasi perekonomian Jawa Timur, yang pada saat berikutnya diikuti pula dengan terjadinya bencana alam di beberapa daerah sepanjang tahun 2006 dan 2007. Namun rentetan kejadian tersebut tidak menyurutkan optimisme pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk

tahun 2007, dengan berkaca pada kondisi perekonomian Jawa Timur yang cukup mendukung di tahun 2006.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2006 sebesar 5,80%, yang terjadi diseluruh sektor ekonomi, dengan bentuk pertumbuhan positif. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dalam pembentukan PDRB ADHB tahun 2006 Jawa Timur sektor industri pengolahan memberikan peranan yang paling besar, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian.

Selanjutnya apabila dilihat dari aspek penggunaannya, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2006 secara tahunan masih didominasi oleh pertumbuhan konsumsi terutama konsumsi rumah tangga, namun hal ini belum mencerminkan basis pertumbuhan perekonomian yang kuat, karena pertumbuhan penciptaan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja.

Nilai inflasi Jawa Timur (kumulatif Januari-Desember 2006) menurun signifikan dibandingkan tahun 2005 yaitu dari 14,59% menjadi 6,67% yang berada di bawah kisaran sasaran 8,1% yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia secara bersama-sama. Penurunan tersebut dikarenakan sudah berkurangnya dampak kebijakan Pemerintah dalam menaikkan harga BBM dan selama setelah itu tidak ada lagi kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga.

Kinerja investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 2006 yaitu telah diterbitkan Surat Persetujuan Investasi oleh BPKM dengan nilai investasi sebesar Rp167.449.029 juta. Apabila dibandingkan dengan persetujuan yang telah disetujui dalam kurun waktu yang sama yaitu periode Januari-Desember 2005 dengan nilai investasi sebesar Rp5.516.850 juta, naik cukup besar yaitu 2.981,16%. Sedangkan kinerja investasi PMA periode Januari-Desember 2006 telah diterbitkan Surat Persetujuan investasi oleh BKM dengan nilai investasi sebesar US\$1.467.546 ribu. Apabila dibandingkan dengan persetujuan yang telah disetujui dalam kurun waktu yaitu periode Januari-Desember 2005 terjadi peningkatan sebesar 210,56%.

Selanjutnya kinerja ekspor non migas Jawa Timur tahun 2006 tercatat sebesar US\$9,019 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 23,47% dibandingkan tahun 2005 yaitu sebesar US\$ 7,114 milyar. Sedangkan volume ekspor pada tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 6,07% dari 6,54 juta ton

menjadi 6,16 juta ton tahun 2005. Struktur ekspor non migas Jawa Timur tahun 2006 didominasi oleh komoditi manufaktur sebesar 91,69%, diikuti sektor pertanian sebesar 8% dan sektor pertambangan sebesar 0,31%. Adapun 10 (sepuluh) negara tujuan utama ekspor non migas, yaitu Jepang; Amerika Serikat; Malaysia; Republik Rakyat Cina; Thailand; Singapura; Korea Selatan; Taiwan; Australia dan Belgia.

Kinerja impor non migas Jawa Timur pada tahun 2005 adalah US\$6,31 milyar, sedangkan tahun 2006 mencapai US\$6,86 milyar. Negara asal yang paling besar nilai impornya masih didominasi Singapura, diikuti Rep. Rakyat Cina, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Australia.

Neraca perdagangan Jawa Timur menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif, dimana tahun 2005 mengalami surplus sebesar US\$800,9 juta. Sedangkan neraca perdagangan tahun 2006 mencapai surplus sebesar US\$2,1 milyar. Selanjutnya kontribusi nilai ekspor non migas Jawa Timur terhadap realisasi nilai ekspor non migas nasional cukup tinggi, pada tahun tahun 2005 sebesar 10,72%, sedangkan tahun 2006 (data sementara) tercatat sebesar 11,33%.

Kinerja perbankan Jawa Timur pada akhir triwulan IV-2006 menunjukkan arah perkembangan yang semakin positif terutama dari sisi penyaluran kredit dan mendekati akhir tahun mengalami percepatan dengan kualitas kredit yang semakin membaik sehingga dapat menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan pada tahun 2007 akan semakin meningkat yang tercermin dari angka *Loan-to-Deposit Ratio (LDR)* untuk bank umum yang berkantor pusat di Surabaya tercatat sebesar 44,75%, masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (52,40%).

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

a. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada tahun 2007 capaian terhadap target Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada bab 2 adalah berikut:

Agenda I. : AGENDA PENINGKATAN KESALEHAN SOSIAL DALAM BERAGAMA

INDIKATOR KINERJA RPJMD 2006 -2008	TARGET	CAPAIAN
	2007	2007
Rasio Angka Perceraian Terhadap Jumlah Rumah Tangga	0,0020	0,1652
Pemakai Narkoba (% Penurunan)	(2)	(2,109)
Indeks Komposit kriminalitas yang dominan (2005=100)	97	114,46

Representasi kinerja agenda Peningkatan Kesalehan Sosial Dalam Beragama diukur dengan indikator Rasio Angka Perceraian Terhadap Jumlah Rumah Tangga; pemakai narkoba dan indeks komposit kriminalitas yang dominan.

Pada tahun 2007, rasio perceraian terhadap jumlah rumahtangga tercatat sebesar 0,156% atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 0,188%. Penurunan nilai tersebut memberikan gambaran bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam mewujudkan keluarga yang harmonis mengalami peningkatan yang cukup baik.

Selanjutnya, indikator pemakai narkoba pada tahun 2007 tercatat sebesar minus 2,11% atau menurun secara signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 22,93%. Sedangkan indeks komposit kriminal pada tahun 2007 sebesar 114,46 menurun dari tahun sebelumnya sebesar 115,59. Kecenderungan penurunan tindak kejahatan ini hendaknya disikapi oleh semua pihak untuk tetap waspada, baik aparat keamanan dan partisipasi aktif warga masyarakat yang dapat dilakukan melalui peningkatan peran kontrol warga masyarakat sampai pada tingkat Rukun Tetangga.

Agenda II. : AGENDA PENINGKATAN AKSESIBILITAS TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA RPJMD 2006 -2008	TARGET	CAPAIAN
	2007	2007
Angka Buta Huruf penduduk umur 10 - 44 tahun (%)	7,94	3,06
Angka Partisipasi Sekolah menurut tingkat pendidikan (%):		
a. SD-MI	99,63	98,42
b. SLTP-MTs	85,71	86,08
c. SLTA-MA	62,02	58,19
Rasio murid SMK terhadap murid SMU	0,70	0,69
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	37,00	35,90
Angka Harapan Hidup (tahun)	67,55	68,69
Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	304	349
Prevalensi kurang Gizi pada anak (%)	20,00	15,86
Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)	84,00	81,79

Untuk mengukur kinerja Agenda Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Kualitas Pendidikan dan Kesehatan maka indikator yang digunakan adalah Angka Buta Huruf; Angka Partisipasi Sekolah; Rasio murid SMK terhadap murid SMU; Angka Kematian Bayi; dan Angka Harapan Hidup; Angka Kematian Ibu melahirkan; Prevalensi kurang Gizi pada anak; dan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan.

Angka Buta Huruf penduduk Jawa Timur usia 10 sampai 44 tahun pada tahun 2007 adalah sebesar 3,06%, mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 3,47%. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberantasan buta aksara cukup berhasil.

Untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia SD penduduk Jawa Timur tahun 2007 sebesar 98,42% naik dibandingkan tahun 2006 sebesar 98,22%. APS usia SLTP juga mengalami peningkatan dari 85,24% pada tahun 2006 menjadi 86,08% pada tahun 2007. Demikian juga, APS usia SLTA mengalami peningkatan dari 53,98% pada tahun 2006 menjadi 58,16% pada tahun 2007. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anak sekolah baik usia SD, SLTP maupun SLTA mengalami peningkatan.

Untuk rasio murid SMK terhadap SMU termasuk Madrasah Aliyah pada tahun 2007 adalah sebesar 0,69, sama dibandingkan tahun lalu, artinya perbandingannya ada 6 sampai 7 murid yang memilih bersekolah di SMK ketika 10 orang yang lain memilih untuk bersekolah di SMU. Kinerja akan terus ditingkatkan, dan sinergis dengan kebijakan Pemerintah dibidang Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam mengukur kinerja aksesibilitas terhadap kualitas kesehatan, maka indikator pertama yang digunakan adalah angka kematian bayi yang pada tahun 2007 tercatat 35 bayi meninggal untuk setiap 1.000 kelahiran hidup, atau relatif sama dibanding tahun sebelumnya, penyebabnya karena adanya peningkatan penolong persalinan oleh tenaga medis, keberhasilan program KB, peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, serta semakin baiknya pengetahuan masyarakat akan kesehatan; kedua, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Jawa Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dari sekitar 68,25 tahun pada tahun 2006 meningkat menjadi 68,69 tahun pada tahun 2007. Meningkatnya umur harapan hidup ini secara tidak langsung memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur; ketiga, angka kematian ibu melahirkan mengalami penurunan dari 364 kasus pada tahun 2006 menjadi 349 kasus pada tahun 2007. Penurunan disebabkan adanya berbagai kebijakan perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, pengembangan klinik Kesehatan Ibu dan Anak; pembangunan rumah sakit; pengembangan puskesmas, dan posyandu.

Disamping ketiga indikator tersebut, maka indikator prevalensi kurang gizi pada anak selama dua tahun terakhir menunjukkan penurunan, yaitu dari sekitar 17,56% pada tahun 2006 turun menjadi sekitar 15,86% pada tahun 2007. Penurunan tersebut terjadi baik pada balita dengan status gizi kurang maupun balita status gizi buruk. Dalam rentang dua tahun terakhir Jawa Timur ini termasuk kategori daerah yang *low risk*, karena Prosentase jumlah balita dengan gizi kurang dan buruk kurang dari 20%, merupakan wujud dari peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang telah dilakukan pemerintah, serta didukung dengan semakin meningkatnya pengetahuan orangtua mengenai pola pemberian asupan gizi pada anak.

Pada indikator Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang direpresentasikan dengan persentase persalinan oleh tenaga medis pada tahun

2007 tercatat sebesar 81,79%, meningkat dibandingkan tahun 2006 sebesar 81,20%. Keadaan ini menggambarkan kesadaran masyarakat akan resiko kematian ibu dan bayi semakin meningkat. Kondisi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan bila angka kematian ibu dan bayi akibat proses persalinan dapat semakin ditekan.

Agenda III. : AGENDA PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN DAN MEMACU KEWIRAUUSAHAAN

INDIKATOR KINERJA RPJMD 2006 -2008	TARGET	CAPAIAN
	2007	2007
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5,40	6,79
Pemenuhan kebutuhan Pangan (Skor Pola Pangan Harapan)	78,20	75,53
ILOR	0,05	0,03
Persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk (%)	17,00	18,84
Peranan APBD terhadap PDRB (%)	1,50	0,94
Indeks Jumlah Kecelakaan Kerja (2005=100)	97,00	71,71

Representasi kinerja Agenda ini diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka; Pemenuhan kebutuhan Pangan; *Incremental Labor Output Ratio* (ILOR); persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk; Peranan APBD terhadap PDRB; dan Indeks Jumlah Kecelakaan Kerja.

Pada tahun 2007 jumlah pengangguran di Jawa Timur tercatat sebesar 1.366.503 jiwa atau tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,79%, menurun dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 1.051.295 jiwa atau 5,74%. Penyebab dari masih tingginya jumlah pengangguran di Jawa Timur masih didominasi oleh tingginya PHK dari perusahaan yang sudah tidak mampu lagi menjalankan usahanya baik karena faktor internal dari perusahaan itu sendiri maupun faktor eksternal yang kurang mendukung aktivitas usahanya. Kondisi ini diikuti pula dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang direpresentasikan dengan indikator ILOR tahun 2007 yang menunjukkan angka positif meskipun masih sangat rendah yaitu 0,07. Artinya, penambahan 100 juta rupiah PDRB pada tahun 2007 hanya mampu menyerap tujuh orang tenaga kerja.

Selanjutnya untuk Indikator pemenuhan kebutuhan pangan yang diukur berdasarkan hasil skor Pola Pangan Harapan, pada tahun 2007 tercatat sebesar 75,53 atau menurun dibandingkan tahun 2006 sebesar 76,20. Kondisi demikian berarti, pola konsumsi/kebiasaan makan penduduk mengalami penurunan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sebagai akibat dari kenaikan harga BBM sehingga harga barang sembako naik dan daya beli masyarakat berkurang.

Selanjutnya, kenaikan harga BBM masih berdampak sampai dengan akhir tahun 2007, khususnya bagi masyarakat yang berada di ambang miskin. Persentase penduduk miskin di Jawa Timur mengalami peningkatan dari 19,1% tahun 2004 menjadi 22,51% pada tahun 2005. Namun demikian, baik pemerintah pusat maupun daerah telah mengantisipasi hal ini dengan melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan diantaranya penyaluran BLT pada rumah tangga miskin, GerduTaskin, program Jaring Pengaman Ekonomi Sosial (JPES), Program Anti Kemiskinan (APP) dan program-program sektor lainnya, sehingga berdasarkan hasil Pendataan Sosial Ekonomi dan Susenas oleh BPS persentase penduduk miskin tahun 2006 dan 2007 turun masing-masing menjadi 19,89% dan 18,84%.

Untuk indikator peranan APBD terhadap PDRB dapat dijelaskan bahwa peranan APBD Provinsi terhadap PDRB terlihat cenderung mengalami penurunan yaitu dari 1,09% tahun 2006 menjadi 0,94% tahun 2007. Artinya, besaran APBD hanya merupakan bagian kecil dari PDRB. Peran APBD dalam perekonomian tidak hanya dilihat dari besar kecilnya nilai nominal, tetapi lebih pada nilai kebijakan yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Terhadap jumlah kejadian kecelakaan kerja yang direpresentasikan oleh indeks kecelakaan kerja cenderung mengalami penurunan yaitu dari 94,09 pada tahun 2006 turun menjadi 71,71 pada tahun 2007. Berbagai upaya agar terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha dan tenaga kerja tentang pentingnya keselamatan mereka di tempat kerja.

Agenda IV. : AGENDA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.

INDIKATOR KINERJA RPJMD 2006 -2008	TARGET 2007	CAPAIAN 2007
Pertumbuhan Ekonomi ADHK Tahun 2000 (%)	6,10	6,02
PDRB Per Kapita (ribu Rupiah)	8.650	14.067
Indeks Daya Beli (Tahun 2000=100)	127	137,87
Indeks Disparitas Wilayah	101,5	109,39
Nilai Tukar Petani (NTP) 2002 =100	106,33	113,12
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107	115,11
Peningkatan Nilai Tambah UKM dalam PDRB (%)	62,00	3,45
Indeks Pembangunan Manusia	65,57	67,92
ICOR	4,80	3,12
Pertumbuhan Penduduk (%)	1,100	0,83

Representasi dari agenda ini diukur dari indikator Pertumbuhan Ekonomi; PDRB Per Kapita; Indeks Daya Beli; Indeks Disparitas Wilayah; Nilai Tukar Petani (NTP); Nilai Tukar Nelayan (NTN); Peningkatan Nilai Tambah UKM dalam PDRB; Indeks Pembangunan Manusia; *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) dan Pertumbuhan Penduduk.

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2007 tumbuh sebesar 6,02% lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMD 2006-2008 dan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,30% namun demikian lebih tinggi dibandingkan tahun 2006 yaitu sebesar 5,80%. Dampak lumpur Lapindo masih tetap menjadi kendala utama bagi aktivitas ekonomi khususnya di sentrasentra industri besar dan sedang di kawasan Pasuruan dan Malang, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian Jawa Timur tahun 2007.

Indikator PDRB perkapita pada 2007 mencapai 14,06 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 12,56 juta rupiah. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan Indeks Daya Beli masyarakat Jawa Timur tahun 2007 secara signifikan mencapai 137,87 poin atau naik 6,52% dibandingkan tahun lalu yaitu 129,44.

Selanjutnya, perkembangan capaian Indeks Disparitas wilayah (Tahun Dasar 2000) tahun 2005 sebesar 113,87, tahun 2006 sebesar 109,50 sedangkan tahun 2007 mencapai 109,39. Dari data tersebut, tingkat kesenjangan ekonomi menunjukkan nilai yang stabil.

Nilai Tukar Petani Jawa Timur tahun 2006 sebesar 113,12 mengalami kenaikan sebesar 1,29%, dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 111,68. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani yaitu 9,96%, lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani yaitu 8,57%. Hal demikian menunjukkan, bahwa kesejahteraan petani tahun 2007 secara umum lebih baik dibanding kondisi tahun 2006. Untuk Nilai Tukar Nelayan tahun 2007 tercatat sebesar 115,11, menunjukkan bahwa selama tahun 2007 nelayan relatif mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena perkembangan harga produksi ikan masih lebih tinggi dari pada perkembangan harga komoditas konsumsi sehari-hari.

Selanjutnya untuk indikator Nilai Tambah UKM dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku meningkat dari 53,26% pada tahun 2006 menjadi 53,45% pada tahun 2007. Hal demikian, menunjukkan bahwa UKM masih merupakan pelaku usaha yang sangat strategis dalam memberikan kontribusinya terhadap perekonomian Jawa Timur, sehingga sektor ini perlu didorong untuk lebih ditingkatkan lagi dengan berbagai fasilitasi dari pemerintah melalui kebijakan baik kerangka program maupun anggaran.

Untuk indikator pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur tahun 2007 mencapai 67,92 mengalami kenaikan 1,05 poin dibandingkan tahun 2006 yaitu 66,87. Tentunya, kenaikan angka IPM ini lebih disebabkan karena adanya perbaikan pelayanan pada kesehatan dan pendidikan yang merupakan dampak dari peningkatan program pada kedua bidang tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa status pembangunan manusia di Jawa Timur termasuk dalam kategori menengah atas.

Pada tahun 2006 urutan tertinggi angka IPM se Jawa Timur dicapai oleh Kota Malang 75,65; diikuti dua kota lainnya yaitu Kota Blitar 74,51; dan Kota Surabaya 73,73. Namun demikian, tidak semua komponen IPM yang telah dicapai oleh ketiga kota tersebut menempati urutan tertinggi. Oleh karena itu masih perlu upaya untuk meningkatkan ketiga komponen IPM baik kesehatan, pendidikan maupun kemampuan daya beli penduduk. Sedangkan, angka IPM terendah di Jawa Timur diduduki Kabupaten Sampang 54,50; Kabupaten Bondowoso 58,87;

dan Kabupaten Probolinggo 58,37. Oleh karena itu, untuk meningkatkan IPM di daerah tersebut, ke depan program-program pembangunan dibidang kesehatan dan pendidikan agar lebih difokuskan pada daerah tersebut.

Terhadap indikator ICOR atau efisiensi pembangunan pada tahun 2007 sebesar 3,12 yang artinya bahwa untuk menambahkan output sebesar 1 unit diperlukan investasi sekitar 3,12 unit. Sedangkan besaran ICOR pada tahun sebelumnya 3,18 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 unit output memerlukan investasi sebesar kurang lebih 3,18 unit.

Terkait dengan indikator pertumbuhan penduduk, maka Jawa Timur merupakan Provinsi dengan penduduk terbesar kedua yaitu 37,5 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk untuk tahun 2002 sampai dengan 2006 sebesar 1,06. Artinya bahwa selama kurun waktu tersebut setiap tahunnya penduduk Jawa Timur bertambah sebesar 1,06%. Sedangkan pada tahun 2007 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,83% atau lebih rendah dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama periode 2002-2006. Dengan jumlah penduduk yang besar maka pengangguran dan kemiskinan merupakan dua masalah yang sering dihadapi oleh suatu wilayah, sehingga program pembangunan baik Program Keluarga Berencana (KB), transmigrasi swakarsa akan menjadi bagian penting pula dalam perbaikan kinerja kedepan dalam rangka menunjang pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Agenda V. : AGENDA OPTIMALISASI PENGENDALIAN SDA, PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENATAAN RUANG

INDIKATOR KINERJA RPJMD 2006 -2008	TARGET 2007	CAPAIAN 2007
Kualitas air sungai (% terhadap parameter kunci dalam baku mutu)	15,00	11,39
Kualitas udara ambien di perkotaan (% terhadap baku mutu udara ambien)	20,00	24,78
Lahan kritis Tahura R.Suryo (Ha)	12.000	8.286
Lahan Kritis Non Tahura R.Suryo di Jawa Timur (Ha)	400.000	100.334

Representasi kinerja agenda ini dapat diukur dengan indikator kualitas air sungai; kualitas udara ambien di perkotaan; pengendalian limbah B3; lahan kritis Tahura R.Suryo dan lahan kritis Non Tahura R.Suryo.

Kualitas air sungai apabila dilihat dari nilai kinerja kualitas air pada tahun 2007 mencapai 11,39% atau dibawah target RPJMD yaitu sebesar 15%. Sedangkan, kualitas udara ambien di perkotaan tercatat sebesar 24,78%, melebihi dari target RPJMD Jawa Timur yaitu sebesar 20%. Artinya secara umum, kualitas udara di Jawa Timur masih baik. Oleh karena itu, kondisi ini agar tetap dipertahankan sehingga tercipta kualitas lingkungan yang sehat.

Pada kondisi lahan kritis Tahura R.Suryo, sampai tahun 2007 sisa lahan yang masih tergolong kritis tercatat seluas 8.286 Ha, yang diakibatkan kondisi fisik cenderung kering serta banyak terdapat jenis tanaman alang-alang dan semak belukar, membuat kawasan hutan itu pada saat musim kemarau rawan bencana kebakaran. Sedangkan lahan kritis Non Tahura R.Suryo yang masih tergolong kritis tahun 2007 tercatat 100.334 Ha.

Agenda VI. : AGENDA PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, SUPREMASI HUKUM DAN HAM

INDIKATOR KINERJA RPJMD 2006 -2008	TARGET 2007	CAPAIAN 2007
Indeks Korban Kejahatan (2005=100)	100	149,24
Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas (%)	(2)	320,09
Indeks Korban Kekerasan (2005=100)	98	106,20
Indeks Perkelahian antar pelajar (2005=100)	98	31,58
Indeks Kerusuhan berlatarbelakang SARA (2005=100)	98	30,77
Indeks Pertikaian antar aparat keamanan (2005=100)	90	100,00
Indeks Kerusuhan berlatar belakang politik (2005=100)	90	0,00
Indeks Konflik antar nelayan (2005=100)	90	33,33

Implementasi agenda Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, Supremasi Hukum dan HAM diukur dengan indikator Indeks Korban Kejahatan; Penurunan Kecelakaan Lalu Lintas; Indeks Korban Kekerasan; Indeks Perkelahian Antar Pelajar; Indeks Kerusuhan berlatar belakang SARA; Indeks Pertikaian antar aparat keamanan (2005=100); Indeks Kerusuhan berlatar belakang politik (2005=100);

Atas dasar indeks korban kejahatan, jumlah kasus kejahatan tahun 2007 sebanyak 45.354 kasus, dengan jumlah korban rata-rata 1 jiwa setiap tahunnya atau meningkat dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar 14.923 kasus. Berdasarkan indeks penurunan kecelakaan lalu lintas, selama periode 2006 - 2007 jumlah

kecelakaan lalu lintas menurun dari 6.914 kali pada tahun 2006 menjadi 5.975 kali kecelakaan tahun 2007. Dengan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dalam periode ini, adanya upaya-upaya untuk menekan jumlah kecelakaan terus dilakukan secara konsisten dan terpadu baik oleh aparat kepolisian maupun dari kesadaran masyarakatnya, seperti yang telah dirintis oleh aparat kepolisian yaitu upaya ketaatan pada masyarakat terhadap peraturan lalu lintas serta himbuan menyalakan lampu bagi sepeda motor di siang hari.

Indeks korban kekerasan pada tahun 2006 tercatat sebesar 59,21 atau mengalami penurunan dari 114,37 pada tahun 2006 menjadi 106,20 pada tahun 2007. Korban kekerasan ini meliputi pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, penganiayaan berat dan kekerasan dalam rumahtangga. Terkait dengan Indeks Perkelahian Antar Pelajar, pada tahun 2007 tercatat sebesar 31,58 artinya pertikaian antar pelajar memang masih terjadi, namun jumlahnya menurun, hanya bersifat personal dan kasuistis. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal demikian perlu adanya wahana atau media bagi mereka, sehingga aktivitasnya dapat tersalurkan dan keberadaannya diakui dalam entitas lainnya.

Untuk Indeks Kerusuhan berlatar belakang SARA, pada tahun 2007 tercatat 30,77 sama dengan tahun lalu artinya kerusuhan berlatar belakang SARA hanya terjadi sebanyak 4 kasus. Konflik ini terjadi sebagai akibat adanya perbedaan pandangan, sosial dan ekonomi pada tingkat stratifikasi di wilayah tertentu.

Dalam hal Indeks Pertikaian antar aparat keamanan; Jawa Timur merupakan daerah yang relatif aman tetapi juga tidak luput dari terjadinya pertikaian antar aparat keamanan. Selama tahun 2007 terjadi 2 kasus pertikaian antar aparat keamanan menurun dibandingkan tahun 2006 yaitu sebanyak 4 kasus.

Pada tahun 2007 untuk Indeks Kerusuhan berlatar belakang politik maka dapat dilihat bahwa stabilitas politik cenderung kondusif dan lebih baik dibandingkan tahun 2006, sehingga kerusuhan yang diakibatkan politik cenderung tidak ada. Hendaknya kondisi ini dapat dipertahankan di tahun-tahun akan datang khususnya menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2008.

**Agenda VII. : AGENDA REVITALISASI PROSES
DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH MELALUI REFORMASI
BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

INDIKATOR KINERJA RPJMD 2006 -2008	TARGET 2007	CAPAIAN 2007
Efektivitas Perda yang dihasilkan	Meningkat	Cukup baik
Penanganan pengaduan di DPRD Jawa Timur	Meningkat	60,00
Rasio jumlah dan besar kerugian negara terhadap APBD (%)	0,330	0,41
Penanganan terhadap Pengaduan Pelayanan Publik	Meningkat	Baik dengan catatan

Representasi kinerja agenda ini diukur dengan indikator Efektivitas Perda yang dihasilkan; Penanganan pengaduan di DPRD Jawa Timur; Rasio jumlah dan besar kerugian negara terhadap APBD; Penanganan terhadap Pengaduan Pelayanan Publik.

Pada tahun 2007 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah (Perda), antara lain perda dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan perekonomian daerah terutama penekanan standart pelayanan publik, juga perda RT/RW Jawa Timur yang diharapkan mampu memberikan gambaran pada para pebisnis dalam mengembangkan bisnisnya di Jawa Timur. Kegiatan sosialisasi Perda telah dilakukan dalam berbagai forum pertemuan dan dengan tujuan mampu meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki kualitas atau derajat kesejahteraan atau kelayakan hidup rakyat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Terhadap indikator penanganan pengaduan di DPRD Jawa Timur, selama tahun 2007 DPRD telah menindaklanjuti sekitar 348 pengaduan yang masuk. Pengaduan yang masuk tetap direspon dengan memperhatikan tata tertib, kepatutan, keadilan dan persamaan hukum, sehingga DPRD mampu menjalankan fungsi mediasi dalam menangani pengaduan masyarakat.

Pada rasio jumlah dan besar kerugian negara terhadap APBD pada tahun 2007 tercatat 0,41%, turun dibandingkan tahun 2006 yaitu sebesar 0,43%, yang menunjukkan komitmen pemerintah yang tinggi terhadap transparansi

pengelolaan keuangan serta tidak lepas dari dukungan dan sikap kritis masyarakat kepada pemerintah.

Untuk indikator penanganan terhadap pengaduan pelayanan publik, selama tahun 2007 memang masih dijumpai adanya kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya perbaikan pelayanan publik telah dilakukan oleh aparat pemerintah secara terus menerus dari waktu ke waktu, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten. Dari berbagai kasus pengaduan yang terjadi, terlihat adanya perbaikan dari pemerintah dan adanya inovasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Peningkatan peran dan fungsi Komisi Pelayanan Publik merupakan salah satu bagian penting dalam meningkatkan pelayanan prima. Hendaknya peran dan fungsi Komisi Pelayanan Publik kedepan terus dapat ditingkatkan dalam melayani pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik.

b. Kinerja Dan Hambatan Pelaksanaan Agenda Pembangunan Pemerintah Provinsi Jatim

Dilihat dari kinerja Agregat agenda pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana target dalam RKPD Tahun 2007, dapat disampaikan sebagai berikut:

Dari 44 target indikator kinerja RPJMD pada Tahun 2007, terdapat 42 indikator yang capaiannya telah terukur dengan kriteria : **tercapai** sebesar 57,14%, **belum tercapai** 42,86%, hal ini berarti secara keseluruhan (57%) program dan kegiatan yang mendukung kinerja agregat ke tujuh agenda pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 dapat dikatakan **"EFEKTIF"**;

Sedangkan ditinjau dari sisi dana yang dialokasikan untuk mencapai target indikator kinerja agregat yang ditetapkan pada tahun Anggaran 2007 untuk Belanja Langsung sebesar Rp2.448.065.944.114,00 dan terealisasikan sebesar Rp2.194.958.733.901,57 atau sebesar 89,66%, hal ini secara umum dapat dikatakan **"EFISIEN"**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan ditinjau dari aspek pelaksanaan program maupun pendanaan:

ASPEK PELAKSANAAN PROGRAM

1) Masalah Pengamalan Nilai-Nilai Agama

Jawa Timur merupakan daerah yang sangat majemuk dengan jumlah penduduk lebih dari 37,47 juta jiwa yang terdiri dari bermacam-macam budaya, suku, agama dan adat istiadat memungkinkan terjadinya gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan konflik-konflik horizontal serta nilai-nilai keagamaan telah banyak terabaikan dan tidak lagi dijadikan sendi-sendi kehidupan sehingga banyak dekadensi moral dan krisis akhlak yang merupakan fenomena kehidupan sehari-hari, karena kurangnya pemahaman agama secara menyeluruh.

Nilai-nilai agama belum menjiwai dalam kehidupan masyarakat sehingga masih tingginya penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma agama, tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan kejahatan lainnya.

2) Masalah Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

a) Pendidikan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Tingkat pendidikan penduduk Provinsi Jawa Timur relatif masih rendah. Sampai dengan tahun 2006 rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 6,90% dan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berpendidikan SMP ke atas masih sekitar 18,78%. Sementara itu angka buta aksara penduduk usia 10 tahun ke atas masih sebesar 11,64%. Kondisi tersebut belum memadai dalam menghadapi persaingan global dan belum mencukupi pula sebagai landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*), selain itu masih terdapat sekitar 0,74% anak usia 13-15 tahun dan sekitar 0,71% anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah baik karena belum/tidak pernah sekolah maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada tahun 2004/2005 sekitar 68.114 gedung SD/MI dan sekitar 50% gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Hal tersebut selain berpengaruh pada ketidaklayakan dan ketidaknyamanan proses belajar mengajar juga berdampak pada peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran.

Meskipun SPP secara resmi telah dihapuskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi pada kenyataan masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah. Pengeluaran lain di luar iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transport, dan uang saku menjadi faktor penghambat pula bagi masyarakat miskin untuk

menyekolahkan anaknya. Beban masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya menjadi lebih berat apabila anak mereka turut bekerja membantu orangtua.

Kecenderungan sekolah untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru selain semakin memberatkan orangtua juga menyebabkan inefisiensi karena buku-buku yang dimiliki sekolah tidak dapat lagi dimanfaatkan oleh siswa.

b) Kesehatan

Belum merata dan terjangkau pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari rasio jumlah sarana yang ada. Pada tahun 2006 di Jawa Timur terdapat 932 Puskesmas dan 2.261 Puskesmas Pembantu, dengan rasio setiap Puskesmas melayani 40.213 orang, yang idealnya hanya melayani 30.000 orang.

Perilaku masyarakat kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, hal ini terlihat dari pengguna jamban sebesar 59,5% dan pemberian ASI eksklusif baru mencapai 38,15% serta jumlah penduduk yang merokok masih tinggi sehingga perilaku PHBS belum sepenuhnya dilakukan masyarakat.

Kendala yang muncul di bidang Kesehatan ini disebabkan:

- (1) Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan sering terjadi pada masyarakat miskin karena kendala biaya.
- (2) Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang prima serta memenuhi standart peralatan sebagai rumah sakit rujukan dan pendidikan.
- (3) Banyaknya penyakit menular dan tidak menular, yang juga dipicu oleh bencana alam yang dialami masyarakat Jawa Timur terutama yang berada pada daerah rawan bencana.
- (4) Kualitas lingkungan yang kurang mendukung, rendahnya kualitas air bersih serta masalah limbah industri dan hasil produksi.

3) Masalah Kemiskinan, Kesenjangan, dan Pengangguran

- a) Kurang terfokusnya berbagai program kemiskinan pada akar masalah;
- b) Belum menyentuh pengembangan potensi desa, sehingga belum mampu menggerakkan sektor riil dipedesaan;
- c) Berbagai kebijakan sektor keuangan belum mampu diakses oleh rumah tangga miskin;

- d) Program kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum terintegrasi sehingga belum mampu menekan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur;
- e) Lambatnya pertumbuhan ekonomi yang diperparah dengan adanya luapan lumpur di Porong Kabupaten Sidoarjo, menambah Jumlah Penduduk Miskin dan pengangguran.

4) Masalah Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur.

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2006 menunjukkan peningkatan namun demikian pertumbuhan tersebut masih didominasi oleh sektor konsumsi, yang menunjukkan bahwa investasi di Jawa Timur masih belum tumbuh sesuai harapan. Terpuruknya pabrik-pabrik yang memproduksi barang ekspor, semakin meluasnya kebijakan untuk memutuskan hubungan kerja karena kondisi unit usaha terus merugi, semakin meningkatnya angka pengangguran, semakin sempitnya lapangan kerja di daerah, semakin menurunnya produksi industri yang diekspor, semakin tidak mempunyai unit usaha dan lembaga ekonomi dalam mengembangkan produksinya, semakin melemahnya daya saing pengusaha dalam pasar bebas yang disebabkan oleh lemahnya daya saing daerah, merupakan masalah yang memperberat kondisi perekonomian di Jawa Timur. Disisi lain terdapat ketimpangan wilayah di Jawa Timur yaitu kawasan selatan Jawa Timur, Madura dan Kepulauan. Pengembangan wilayah ini menjadi prioritas, dan secara politis akan mendukung rasa persatuan dan kesatuan bangsa, karena pemerataan hasil pembangunan akan terjadi sampai ke pelosok wilayah.

5) Masalah Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Isu strategis yang saat ini memerlukan perhatian serius adalah pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terutama konservasi dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan, serta pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran air, udara dan tanah.

6) Masalah Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Penegakan Supremasi Hukum dan HAM, Ketentraman dan Ketertiban

Penerapan otonomi daerah masih menyisakan banyak masalah yang terkait dengan kewenangan dan sinkronisasi kebijakan, selain itu tuntutan otonomi desa semakin menguat. Desa sebagai satuan pemerintahan wilayah terkecil lebih banyak menjadi obyek pembangunan.

Berkaitan dengan penegakan supremasi hukum dan HAM bahwa Sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka, mengakibatkan hukum belum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Kondisi tersebut juga diperlemah dengan profesionalisme dan kualitas sistem peradilan yang masih belum memadai sehingga membuka kesempatan terjadinya penyimpangan kolektif di dalam proses peradilan sebagaimana dikenal dengan istilah mafia peradilan.

Selanjutnya berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban dengan beragamnya kondisi sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama yang ada menjadikan Jawa Timur memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Potensi ancaman ini harus dapat diminimalkan sehingga tidak menjadi bibit munculnya konflik horizontal dan vertikal serta adanya terorisme.

7) Masalah Terbatasnya Sumber Pembiayaan

Alokasi dana pembangunan Jawa Timur saat ini masih sangat terbatas, walaupun didukung dengan bagian dana dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat. Jumlah dana riil yang ada masih belum memadai untuk dapat menuntaskan permasalahan pokok yang dihadapi Jawa Timur, lebihlebi dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran. Kecilnya dana pemerintah tersebut disebabkan antara lain:

1. Terbatasnya pembiayaan pembangunan APBN/APBD
2. Kecilnya pengembalian dana perimbangan ke Provinsi
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

4. Kebijakan Akuntansi

a. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pada Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Entitas Akuntansi adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai Pengguna Anggaran dalam APBD Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 56 SKPD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007, Entitas Pelaporan berada pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Pahlawan Nomor 110, Surabaya, Jawa Timur.

b. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007, diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Basis akuntansi yang digunakan pada transaksi dan kejadian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur adalah dasar kas modifikasian. Dasar kas modifikasian adalah kombinasi basis kas dengan basis akrual.

1) Basis Kas

Basis Kas (*cash basic*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis Kas digunakan dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

2) Basis Akrual

Basis Akrual (*accrual basic*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual digunakan dalam Laporan Neraca untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

3) Sistem Pembukuan

Sistem pembukuan yang digunakan adalah sistem pembukuan berpasangan yang berpedoman atas persamaan dasar akuntansi, yaitu :

Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana.

Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.

d. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Basis pengukuran yang digunakan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini memberikan informasi yang diharapkan dapat menyajikan dengan memadai dan dapat mengindikasikan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari :

1) Pendapatan

Definisi

Pendapatan Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

a) Pengakuan

- (1) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi PPKD;
- (2) Pendapatan diakui pada saat disetorkannya pendapatan oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi SKPD;
- (3) Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian, bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut, akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan

ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

- (4) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek;
- (5) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- (6) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- (7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut;
- (8) Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD;
- (9) Pendapatan Daerah dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

b) Pengukuran

- (1) Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- (2) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;

2) Belanja

Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

a) Pengakuan

- (1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi Belanja Langsung (LS) oleh Bendahara Umum Daerah dan diakui pada saat disahkannya Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak langsung oleh Pengguna Anggaran SKPD di masing-masing SKPD untuk transaksi Belanja Tidak Langsung;
- (2) Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- (3) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain;

b) Pengukuran

Belanja dibukukan sebesar pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah kompensasi potongan).

3) Pembiayaan

Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah sebuah transaksi keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan ini terdiri dari :

a) Penerimaan Pembiayaan

- (1) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;
- (2) Penerimaan Pembiayaan berasal dari:
 - (a) Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - (b) Pencairan Dana Cadangan;

- (c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - (d) Penerimaan pinjaman daerah;
 - (e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman; (f) Penerimaan piutang daerah.
- (3) Penerimaan pembiayaan dilaksanakan dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b) Pengeluaran Pembiayaan

- (1) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan Dana Cadangan;
- (2) Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Pengeluaran Pembiayaan antara lain digunakan untuk:
 - (a) Pembentukan Dana Cadangan;
 - (b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - (c) Pembayaran Pokok Pinjaman (utang); (d) Pemberian Pinjaman daerah.

d. Neraca

1) Kas

Definisi

Alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat digunakan.

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

2) Piutang

Definisi

Jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah, yang terdiri dari :

- Piutang Pajak;
- Piutang Retribusi;
- Bagian Lancar;
- Piutang Lain-lain.

a) Pengakuan

Piutang diakui pada saat piutang terjadi/timbul atau diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dalam periode berjalan.

b) Pengukuran

Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

3) Persediaan

a) Pengakuan

(1) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;

(2) Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

b) Pengukuran

(1) Persediaan dinilai sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

(2) Persediaan dinilai sebesar nilai wajar apabila diperoleh dengan cara donasi atau persembahkan.

2) Investasi

a) Pengakuan

(1) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan;

(2) Hasil investasi berupa bunga deposito, yang diperoleh dari investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebagai pendapatan.

b) Pengukuran

(1) Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito;

(2) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, dicatat sebesar biaya perolehannya.

3) Aset Tetap

a) Pengakuan

- (1) Aset tetap diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah;
- (2) Pengembangan aktiva tetap diakui apabila ada peningkatan penilaian aktiva tetap karena diperluas atau diperbesar;
- (3) Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Pengurangan tersebut didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang dalam Tim Penghapusan Aset Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

b) Pengukuran

- (1) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan yaitu nilai aset tersebut dijumlahkan dengan biaya untuk memperolehnya yaitu dengan biaya administrasi, pengiriman, pemasangan sampai dengan aset tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- (2) Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan;
- (3) Aktiva tetap yang dihentikan secara permanen dari penggunaan aktif dicatat sebesar nilai tercatatnya;
- (4) Dalam pengukuran Aset Tetap Pemerintah Propinsi Jawa Timur tidak melaksanakan depresiasi atau penyusutan terhadap nilai aset yang ada. Aset yang sudah rusak atau tidak berguna dan membebani belanja pemeliharaan Propinsi Jawa Timur yang melebihi manfaatnya dilaksanakan penghapusan.

4) Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Pengakuan

- (1) Suatu benda berwujud diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan antara lain jika besar kemungkinan bahwa akan diperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara handal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;
- (2) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan menjadi aset tetap jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

b) Pengukuran

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehannya.

5) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

a) Pengakuan

Kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat timbul/terjadinya kemitraan.

b) Pengukuran

Kemitraan dengan pihak ketiga dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan untuk kemitraan.

6) Kewajiban

a) Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban itu timbul.

b) Pengukuran

Kewajiban dicatat sejumlah nilai nominal atau sejumlah kas dan setara kas dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang.

7) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban. Ekuitas Dana dikelompokkan atas :

- a) Ekuitas Dana Lancar;
- b) Ekuitas Dana Investasi;
- c) Ekuitas Dana Cadangan.

8) Dana Cadangan

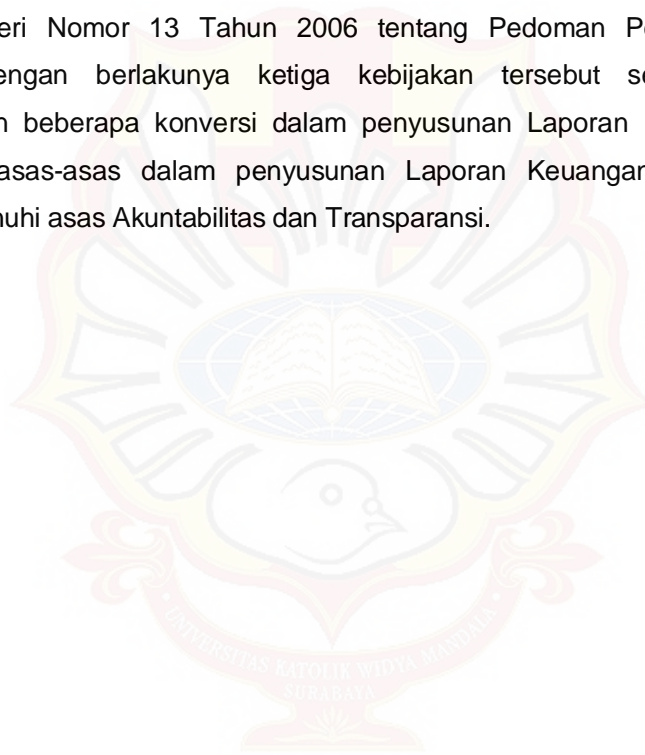
Dalam penyusunan Laporan Keuangan ini, Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah memasukkan pos Dana Cadangan.

9) Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang Rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

d. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Propinsi Jawa Timur

Dalam penerapan Kebijakan Akuntansi pada penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur berusaha untuk secara konsisten melaksanakannya disertai dengan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan berlakunya ketiga kebijakan tersebut sebagai dasar, maka dilaksanakan beberapa konversi dalam penyusunan Laporan Keuangan agar dapat memenuhi asas-asas dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memenuhi asas Akuntabilitas dan Transparansi.



5. Penjelasan Atas Rekening-rekening Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas

a. Neraca

1) Aset lancar

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
a) Kas di Kas Daerah	Rp 1.237.638.636.382,43	Rp 810.854.071.190,99
Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006. Rincian kas dan bank berikut ini.		

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
Jenis Kas di Kas Daerah		
Saldo di rekening Bank (Bank Jatim Cabang Utama)	Rp 1.237.638.636.382,43	Rp 810.854.071.190,99
Rincian :		
Rekening Kas Daerah (0011000477)	Rp 1.237.638.636.382,43	Rp 810.854.071.190,99
Dana Alokasi Umum (0011142000)	Rp -	Rp -
Jumlah saldo Kas di Kas Daerah	Rp 1.237.638.636.382,43	Rp 810.854.071.190,99

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006 Rp</u>
b) Kas di Rekening Rumah Sakit	Rp 35.256.020.830,79	34.237.168.219,90

Jumlah tersebut adalah saldo Kas di Rekening Fungsional Rumah Sakit per 31 Desember 2006 dan per 31 Desember 2007 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
Kas di Rekening Fungsional Rumah Sakit		
- RSUD Dr Soetomo	Rp 11.388.387.904,42	Rp 16.532.326.595,42
- RSUD Dr Saiful Anwar	Rp 11.145.865.787,00	Rp 11.046.096.016,00
- RSUD Dr Soedono	Rp 5.016.003.670,48	Rp 3.084.178.142,48
- RSU Haji	Rp 6.340.039.716,89	Rp 1.819.584.501,00
- RS Jiwa Menur	Rp 1.030.296.284,00	Rp 1.396.815.853,00
- RSK Paru Batu	Rp 84.792.081,00	Rp 52.029.839,00
- RSK Paru Dungus	Rp 158.494.723,00	Rp 202.897.790,00
- RSK Paru Jember	Rp 42.364.901,00	Rp 71.554.551,00
- RSK Kusta Kediri	Rp 13.700.625,00	Rp 0,00
- RSK Kusta Sumberglagah	Rp 36.075.138,00	Rp 28.877.050,00
Jumlah saldo Kas di Rekening Fungsional RS	35.256.020.830,79	34.237.168.219,90

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
c) Kas di Bendahara		
Penerimaan	Rp 271.663.646,60	Rp -

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2007 dengan rincian berikut:

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
Kas di Bendahara Penerimaan SKPD		
- Biro Perekonomian	Rp 220.872.916,60	
- Dinas Koperasi dan UKM	Rp 4.219.125,00	
- Dinas Perhubungan	Rp 25.885.857,00	
- RSUD Dr Saiful Anwar	Rp 20.685.748,00	
Jumlah saldo Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	Rp 271.663.646,60	-

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
c) Kas di Bendahara		
Pengeluaran	Rp 8.588.974.570,00	Rp 2.218.160.680,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2006. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran berikut ini:

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
Kas di Bendahara Pengeluaran		
- Dinas Kesehatan	Rp 167.369.062,00	
- RSUD Dr Soetomo	Rp 109.236.723,00	
- RSK Kusta Sumberglagah	Rp 296.955.338,00	
- Dinas PU Bina Marga	Rp 807.702.051,00	-
- Bapeprov	Rp 201.000,00	
- DLLAJ	Rp 254.399.625,00	
- Bapedal	Rp 624.855.050,00	
- Dinas Sosial	Rp 1.000,00	
- Dinas Tenaga Kerja	Rp 1.716.960.884,00	
- Dinas Koperasi dan UKM	Rp 210.291.247,00	
- Dispora	Rp 257.478.921,00	
- Biro Perekonomian	Rp 40.593.790,00	
- Biro Mental dan Spiritual	Rp 87.205.920,00	
- Badan Ketahanan Pangan	Rp 96.727.712,00	
- Dinas Energi dan SDM	Rp 2.175.820,00	
- PFK Dinas Perkebunan	Rp 810.115.994,00	
- PFK Balitbang	Rp 26.250,00	
- PFK Biro Umum	Rp 720.850.683,00	

- RSUD Dr Saiful Anwar (Askeskin) Rp 2.385.827.500,00

Jumlah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 8.588.974.570,00 Rp 2.218.160.680,00

Perbandingan Saldo Kas di Neraca dengan SiLPA di LRA

No	Uraian	Kas di Neraca (Rp)	SiLPA (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	1.237.638.636.382,43	1.237.638.636.382,43
2	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	a. Sisa UP disetor 2008	4.672.154.143,00	4.672.154.143,00
	b. Dinas Kesehatan (2006)		1.393.331.210,00
	c. PFK Bendahara Pengeluaran	1.530.992.927,00	
	d. Sisa Dana Askeskin (Tak terduga)	2.385.827.500,00	
3	Kas di Rekening Rumah Sakit	35.256.020.830,79	35.256.020.830,79
4	Kas di Bendahara Penerimaan		
	a. Bunga Dana Bergulir yang ditangguhkan di Dinas Perekonomian	220.872.916,60	
	b. Bunga Dana Bergulir yang ditangguhkan di Dinas Koperasi dan PKM	4.219.125,00	
	c. SP III yang ditangguhkan di Dinas Perhubungan	25.885.857,00	
	d. Bunga rekening penampungan Askeskin yang ditangguhkan di RSUD Dr Saiful Anwar	20.685.748,00	
	Jumlah	1.281.755.295.429,82	1.278.960.142.566,22

Penjelasan Saldo Kas di Neraca dengan SiLPA di LRA:

Saldo Kas di Neraca : Rp1.281.755.295.429,82

Saldo SiLPA di LRA : Rp1.278.960.142.566,22

Selisih : Rp 2.795.152.863,60

Terdiri dari:

Kas di Bendahara Pengeluaran (PFK) : Rp1.530.992.927,00

Kas di Bendahara Pengeluaran (Dinas Kesehatan 2006) : (Rp1.393.331.210,00)

Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa Askeskin) : Rp2.385.827.500,00

Kas di Bendahara Penerimaan : Rp 271.663.646,60

Jumlah : Rp2.795.152.863,60

Keterangan

(1) Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan tahun 2006 sebesar Rp1.393.331.210,00 tidak termasuk Kas di Neraca karena telah direklasifikasikan menjadi Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Rugi;

- (2) Kas sisa dana Askeskin di RSUD Dr Saiful Anwar termasuk Kas di Neraca karena jumlah Kas tersebut belum dimanfaatkan dan belum dikembalikan ke Kas Daerah;
- (3) Utang PFK/Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.530.992.927,00 termasuk Kas di Neraca tetapi bukan termasuk SILPA di LRA karena jumlah tersebut merupakan hak negara yang belum disetor sampai 31 Desember 2007 dan masih berada di Bendahara Pengeluaran;
- (4) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp271.663.646,60 termasuk Kas di Neraca tetapi tidak termasuk SILPA di LRA. Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2007 sehingga dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

Perbandingan Saldo Kas di Neraca dengan SILPA di Neraca

No	Uraian	Kas di Neraca (Rp)	SILPA (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	1.237.638.636.382,43	1.237.638.636.382,43
2	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	a. Sisa UP disetor 2008	4.672.154.143,00	4.672.154.143,00
	b. PFK Bendahara Pengeluaran	1.530.992.927,00	1.530.992.927,00
	c. Sisa Dana Askeskin (Tak terduga)	2.385.827.500,00	2.385.827.500,00
3	Kas di Rekening Rumah Sakit	35.256.020.830,79	35.256.020.830,79
4	Kas di Bendahara Penerimaan		
	a. Bunga Dana Bergulir yang ditangguhkan di Dinas Perekonomian	220.872.916,60	
	b. Bunga Dana Bergulir yang ditangguhkan di Dinas Koperasi dan PKM	4.219.125,00	
	c. SP III yang ditangguhkan di Dinas Perhubungan	25.885.857,00	
	d. Bunga rekening penampungan Askeskin yang ditangguhkan di RSUD Dr Saiful Anwar	20.685.748,00	
	Jumlah	1.281.755.295.429,82	1.281.483.631.783,22

Penjelasan perbedaan Kas di Neraca dengan SILPA di Neraca

Kas di Neraca : Rp1.281.755.295.429,82
 SILPA di Neraca : Rp1.281.483.631.783,22
 Selisih : Rp 271.663.646,60

Terdiri dari:

Bunga Dana Bergulir yang ditangguhkan di Dinas Perekonomian : 220.872.916,60
 Bunga Dana Bergulir yang ditangguhkan di Dinas Koperasi dan PKM : 4.219.125,00
 SP III yang ditangguhkan di Dinas Perhubungan : 25.885.857,00
 Bunga rekening penampungan Askeskin yang ditangguhkan di RSUD Dr Saiful Anwar : 20.685.748,00

Keterangan

- (1) Bunga Dana Bergulir pada Dinas Perekonomian sebesar Rp220.872.916,60 merupakan penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2007. Jumlah tersebut termasuk Kas di Neraca namun tidak termasuk SILPA di Neraca. Jumlah tersebut dicatat sebagai Pendapatan yang ditangguhkan.
- (2) Bunga Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan PKM sebesar Rp4.219.125,00 merupakan penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2007. Jumlah tersebut termasuk Kas di Neraca namun tidak termasuk SILPA di Neraca. Jumlah tersebut dicatat sebagai Pendapatan yang ditangguhkan.
- (3) Sumbangan Pihak III pada Dinas Perhubungan sebesar Rp25.885.857,00 merupakan penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2007. Jumlah tersebut termasuk Kas di Neraca namun tidak termasuk SILPA di Neraca. Jumlah tersebut dicatat sebagai Pendapatan yang ditangguhkan.
- (4) Bunga rekening penampungan Askeskin di RSUD Dr Saiful Anwar sebesar Rp20.685.748,00 merupakan penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2007. Jumlah tersebut termasuk Kas di Neraca namun tidak termasuk SILPA di Neraca. Jumlah tersebut dicatat sebagai Pendapatan yang ditangguhkan.

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
d) Piutang Pajak	Rp 96.996.693.111,00	Rp 100.967.765.949,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah tagihan pajak daerah Tahun 2007 dan 2006
Rincian piutang pajak sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
PKB Non Penetapan Jabatan	Rp 879.250.515,00	Rp 1.433.563.921,00
PKB Penetapan Jabatan	Rp 93.892.858.700,00	Rp 96.597.809.740,00
BBNKB	Rp 239.111.850,00	Rp 1.413.106.850,00
P3ABT	Rp 1.219.188.636,00	Rp 926.725.001,00
P3AP	Rp 766.283.410,00	Rp 596.560.437,00
Total	<u>Rp 96.996.693.111,00</u>	<u>Rp 100.967.765.949,00</u>

	31 Desember 2007	31 Desember 2006
e) Piutang Retribusi	Rp 55.149.662.819,00	Rp 131.675.292,35

Jumlah tersebut merupakan tagihan retribusi Tahun 2007 dan 2006 yang belum tertagih dan belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

Rincian piutang retribusi di bawah ini.

No	Jenis retribusi	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Retribusi Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian Hasil Hutan	26.499.510,00	131.675.292,35
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	55.123.163.309,00	0,00
	Total	55.149.662.819,00	131.675.292,35

	31 Desember 2007	31 Desember 2006
f) Bagian Lancar Tagihan		
Penjualan Angsuran	Rp 990.653.996,00	Rp 1.169.375.028,00

Jumlah tersebut merupakan Tagihan Penjualan Angsuran atas penjualan rumah secara angsuran kepada pegawai yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006. Tagihan Penjualan Angsuran terdiri atas angsuran penjualan perumahan pada:

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Penjaringan I	47.083.181,00	59.797.701,00
2.	Penjaringan II	174.117.479,00	203.212.939,00
3.	Jenggolo I	340.782.100,00	408.827.600,00
4.	Jenggolo II	335.985.718,00	377.093.000,00
5.	Jenggolo III	92.685.518,00	120.443.788,00
	Jumlah	990.653.996,00	1.169.375.028,00

Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memisahkan Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan (Bagian Lancar) dengan Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan (Aset Lainnya)

	31 Desember 2007	31 Desember 2006
g) Bagian Lancar		
Tuntutan Ganti		
Kerugian Daerah	Rp 84.278.650,00	Rp 212.671.300,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang TP/TGR yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

	31 Desember 2007	31 Desember 2006
h) Piutang Lain-lain	Rp 47.889.712,00	Rp 499.487.406,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lain-lain yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Piutang SP3-ASDP (Dinas Perhubungan)	46.689.712,00	46.689.712,00
2.	Piutang Pendapatan Bunga (Biro Perekonomian)	0,00	100.000.000,00
3.	Piutang Pendapatan Bagian Laba (Biro Perekonomian)	0,00	352.797.694,00
4.	Piutang Lain-lain (RS Jiwa Menur)	1.200.000,00	0,00
	Jumlah	47.889.712,00	499.487.406,00

	31 Desember 2007	31 Desember 2006
i) Persediaan	Rp 52.044.941.410,42	Rp 45.706.680.880,00

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 pada beberapa SKPD. Rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Dinas P dan K	1.239.858.320,64	2.041.469.957,00
2.	RSUD Dr. Soetomo	10.542.065.221,16	7.995.892.444,00
3.	RSUD Dr Saiful Anwar	11.814.900.183,23	11.568.598.187,00
4.	RSUD Dr Soedono	2.329.696.005,27	2.282.228.304,00
5.	RS Haji Surabaya	1.070.864.800,00	1.010.843.486,00
6.	RS Jiwa Menur	808.583.833,65	958.329.763,00
7.	RS Paru Batu	490.532.352,35	380.976.436,00
8.	RS Paru Jember	341.272.243,00	487.655.611,00
9.	RS Paru Dungus	64.132.023,00	58.150.881,00
10.	RS Kusta Kediri	477.047.188,78	646.113.565,00
11.	RS Kusta Sumber Glagah	385.519.975,00	239.055.520,00
12.	Dinas PU Bina Marga	230.624.079,50	223.264.595,00
13.	Dinas PU Pengairan	626.569.904,00	474.942.404,00
14.	Dinas Permukiman	-	944.942.404,00
15.	Bapeprov	6.569.915,00	21.889.946,00
16.	Dinas Perhubungan	202.400,00	-
17.	Dinas LLAJ	456.943.015,00	540.056.725,00
18.	Bapedal	81.565.290,00	65.976.280,00
19.	Dinas Kependudukan	36.529.642,68	57.466.930,00
20.	Dinas Sosial	296.298.603,00	216.809.165,00
21.	Dinas Tenaga Kerja	12.863.000,00	16.179.788,00
22.	Dinas Koperasi dan PKM	8.054.670,00	1.176.048,00
23.	Badan Penanaman Modal	3.354.560,00	-
24.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	13.503.361,73	3.544.484,00
25.	Bakesbang	186.725,00	1.414.075,00
26.	Sekretariat Daerah	1.961.965.261,76	3.140.642.360,00
27.	Sekretariat DPRD	233.753.250,00	209.757.257,00
28.	Balitbang	6.945.625,00	10.880.350,00
29.	Badan Pengawasan	6.718.801,00	4.387.607,00

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
30.	Dinas Pendapatan	17.583.190.810,00	9.184.547.996,00
31.	Kantor Perwakilan	18.586.100,00	-
32.	Bakorwil I Madiun	32.000,00	-
33.	Bakorwil II Bojonegoro	6.083.020,00	-
34.	Bakorwil III Malang	-	1.847.525,00
35.	Bakorwil IV Pamekasan	1.013.100,00	2.313.285,00
36.	Kantor Kas Daerah	10.594.255,00	24.210.385,00
37.	Badan Arsip	1.139.600,00	8.403.205,00
38.	Dinas Infokom	3.817.350,00	929.200,00
39.	BPDE	5.442.228,00	4.128.222,00
40.	Dinas Perkebunan	4.117.958,00	-
41.	Dinas Peternakan	450.989.915,00	3.323.068.650,00
42.	Badan Ketahanan Pangan	-	2.007.579,00
43.	Dinas Kehutanan	157.918.760,00	14.896.186,00
44.	Dinas Energi dan SDM	16.601.991,67	8.953.340,00
45.	Dinas Pariwisata	221.529.273,00	298.647.465,00
46.	Dinas Perikanan dan Kelautan	-	136.231.504,00
47.	Dinas Perindag	16.591.280,00	29.912.390,00
	Jumlah	52.044.941.410,42	45.706.680.880,00

31 Desember 2007

31 Desember 2006

2) **Investasi jangka Panjang**

a) **Investasi Dana Bergulir Rp 379.995.70.850,00 Rp 320.232.700.850,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo investasi Dana Bergulir Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

Rincian Dana Bergulir sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	PT Bank Jatim (UKMK)	100.000.000.000,00	110.000.000.000,00
2.	PT BPR Jatim (UKMK)	65.000.000.000,00	93.000.000.000,00
3.	Badan Ketahanan Pangan	51.855.000.000,00	54.955.000.000,00
4.	Dinas Peternakan	27.513.700.850,00	27.513.700.850,00
5.	Dinas Koperasi dan UKM	39.264.000.000,00	47.727.000.000,00
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.200.000.000,00	11.200.000.000,00
7.	Dinas Perkebunan	800.000.000,00	1.200.000.000,00
8.	Dinas Perikanan dan Kelautan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
9.	Dinas Pertanian	3.200.000.000,00	4.000.000.000,00
10.	PT Bank Jatim (PJTKI)	20.000.000.000,00	29.000.000.000,00
	Jumlah	379.995.700.850,00	320.232.700.850,00

31 Desember 2007

31 Desember 2006

b) **Penyertaan Modal**

Rp 910.070.658.500,00 Rp 714.813.358.500,00

Pemerintah Daerah

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 11 Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2007 dan 31

Desember 2006. Penilaian investasi penyertaan modal menggunakan metode biaya untuk seluruh tingkat kepemilikan.

Rincian Penyertaan Modal sebagai berikut.

No.	Uraian	Pendirian	% Kepemilikan	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut	Akta Pendirian No. 166/1974	25,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
2.	PD Air Bersih	Perda No. 2/1987 jo 12/1996	100,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
3.	PT Askrida	Akta Pendirian No. 131/1997	0,46	560.000.000,00	560.000.000,00
4.	PT Bank Jatim	Perda No. 1/1999	78,35	510.949.000.000,00	416.966.000.000,00
5.	PT Panca Wira Usaha	Perda No. 5/1999	99,99	94.930.058.500,00	64.930.058.500,00
6.	PT Bank Perkreditan Rakyat	Perda No. 10/2000	86,16	41.380.300.000,00	30.380.000.000,00
7.	PT Jatim Marga Utama	Perda No. 25/2002	70,00	30.002.000.000,00	30.002.000.000,00
8.	PT Jatim Krida Utama	Akta Pendirian No. 30/2004	60,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00
9.	PT Jatim Investment Manajemen	Perda No. 12/2003 jo 4/2004	99,51	40.300.000.000,00	40.300.000.000,00
10.	PT Jatim Graha Utama	Perda No. 14/2005	99,82	82.774.300.000,00	35.000.000.000,00
11.	PT Petrogas Jatim Utama	Perda No. 1/2006	99,00	94.875.000.000,00	82.375.000.000,00
	Jumlah			910.070.658.500,00	714.813.358.500,00

3) Aset Tetap 31 Desember 2007
Rp 23.699.914.950.542,00 31 Desember 2006
Rp 23.250.187.871.653,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006. Di antara aset tetap tersebut, sebesar Rp225.421.673.283,00 tidak jelas status kepemilikannya karena dicatat dengan kode kepemilikan pihak selain Pemerintah Provinsi

a) Tanah 31 Desember 2007
Rp 12.382.351.961.109,00 31 Desember 2006
Rp 12.288.001.613.170,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
d) Jalan, irigasi dan Jaringan	Rp 8.601.027.328.985,00	Rp 8.512.764.273.156,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aktiva Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Jalan dan Jembatan	641.641.966.991,00	440.354.685.379,00
2.	Bangunan Air (Irigasi)	7.945.547.288.504,00	8.062.596.235.258,00
3.	Instalasi	6.965.573.407,00	5.955.981.307,00
4.	Jaringan	6.872.500.083,00	3.857.371.212,00
	Jumlah	8.601.027.328.985,00	8.512.764.273.156,00

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
e) Aset Tetap lainnya	Rp 11.236.833.713,00	Rp 10.939.523.032,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aktiva tetap lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

Rincian Aset Tetap Lainnya berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Buku dan Perpustakaan	5.629.952.900,00	4.462.736.519,00
2.	Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan	4.584.058.346,00	3.644.345.496,00
3.	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	1.022.822.467,00	656.174.967,00
4.	Alat Keamanan	-	2.176.266.050,00
	Jumlah	11.236.833.713,00	10.939.523.032,00

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 171.883.125.444,00	Rp 80.091.133.955,00

Jumlah tersebut merupakan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap bangunan dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

4)	Dana Cadangan	31 Desember 2007	31 Desember 2006
		Rp 479.055.408.392,75	Rp 328.276.814.248,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Cadangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

Rincian Dana Cadangan berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Dana Cadangan Murni	50.562.937.305,00	118.276.814.248,00
2.	Dana Pilkada Gubernur	428.492.471.087,75	210.000.000.000,00
	Jumlah	479.055.408.392,75	328.276.814.248,00

Dana Cadangan Murni sebesar Rp41.500.000.000,00 digunakan sebagai jaminan pinjaman RSUD Dr Soetomo dan RSUD Dr Saiful Anwar kepada Bank Jatim.

5)	Aset lainnya	31 Desember 2007	31 Desember 2006
		Rp 11.393.331.210,00	Rp 10.000.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

Rincian Aset Lainnya berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	BOT	-	-
2.	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
3.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.393.331.210,00	-
4.	Kemitraan Pihak Ketiga	-	-
5.	Aset Tak Berwujud	-	-
6.	Aset Lain-lain	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Jumlah	11.393.331.210,00	10.000.000.000,00

Aset Lain-lain sebesar Rp10.000.000.000,00 adalah utang PT. Panca Wira Usaha kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan dikonversikan menjadi penyertaan modal saham. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.393.331.210,00 adalah reklasifikasi dari Ganti Rugi atas Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan tahun 2006 yang telah dikenakan SKTJM. Aset lainnya belum termasuk aset tak berwujud berupa *software* aplikasi dan sistem informasi yang belum dikapitalisasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

		<u>31 Desember 2007</u>		<u>31 Desember 2006</u>
6)	Kewajiban			
a)	Kewajiban Jangka Pendek	Rp	169.651.146.773,28	Rp 153.181.915.618,69
(1)	Utang PFK	Rp	1.530.992.927,00	Rp -

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang PFK yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2007. Utang PFK tersebut merupakan pemotongan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2007 pada:

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Dinas Perkebunan	810.115.994,00	-
2.	Balitbang	26.250,00	-
3.	Biro Umum	720.850.683,00	-
	Jumlah	1.530.992.927,00	-

		<u>31 Desember 2007</u>		<u>31 Desember 2006</u>
(2)	Utang Bunga	Rp	524.831.946,00	Rp -

Jumlah tersebut merupakan saldo utang bunga per 31 Desember 2007. Utang bunga berasal dari pinjaman RSUD Dr Soetomo kepada Bank Jatim.

		<u>31 Desember 2007</u>		<u>31 Desember 2006</u>
(3)	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp	3.475.168.052,00	Rp 3.349.395.216,93

Jumlah tersebut merupakan saldo bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2007. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang berasal dari pinjaman RSUD Dr Soetomo kepada Bank Jatim yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang belum termasuk utang RSUD Dr. Saiful Anwar sebesar Rp4.730.000.000,00 yang menjadi tanggung jawab unit paviliun.

		<u>31 Desember 2007</u>		<u>31 Desember 2006</u>
(4)	Utang Belanja	Rp	357.489.502,00	Rp 16.067.194.266,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006. Utang Belanja berasal dari utang pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon. Rincian utang belanja pada SKPD:

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Dipenda (Utang biaya pemungutan)	-	16.067.194.266,00
2.	RSU Dr Saiful Anwar	125.941.687,00	-
3.	RSU Dr Soedono	8.108.720,00	-
4.	RS Kusta Sumberglagah	11.035.431,00	-
5.	Dinas Kependudukan	36.617.800,00	-
6.	Bakorwil IV	15.073.497,00	-
7.	Dinas Kesehatan	160.712.367,00	-
	Jumlah	357.489.502,00	16.067.194.266,00

(4) **Utang Bagi Hasil Pajak** **Rp 157.176.933.046,81** **Rp 130.456.718.574,51**

Jumlah tersebut merupakan saldo utang bagi hasil pajak per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

Rincian utang bagi hasil pajak sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Bagian Kab/Kota dari PKB dan BBNKB	122.108.628.342,92	52.633.365.555,70
2.	Bagian Kab/Kota dari PBBKB	33.623.564.480,17	76.215.401.285,08
3.	Bagian Kab/Kota dari P3AP dan P3ABT	1.444.740.223,72	1.607.951.733,73
	Jumlah	157.176.933.046,81	130.456.718.574,51

(5) **Utang Bagi Hasil Bukan Pajak** **Rp 3.959.254.211,08** **Rp 3.302.331.022,86**

Jumlah tersebut merupakan saldo utang bagi hasil bukan pajak per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006. Rincian utang bagi hasil bukan pajak sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Bagian Kab/Kota dari SP3	982.100.474,16	70.210.136,94
2.	Bagian Kab/Kota dari Tahura	95.028.973,00	81.562.368,75
3.	Bagian Kab/Kota dari RP3HH	1.003.981.557,68	1.521.036.666,22
4.	Bagian Kab/Kota dari IMTA	973.893.120,20	1.423.337.644,00
5.	Bagian Kab/Kota dari TERA	370.482.783,80	157.184.206,00
6.	Bagian Kab/Kota dari ASDP	464.110.207,46	49.000.000,00
7.	Bagian Kab/Kota dari luran Ternak	69.657.094,78	-
	Jumlah	3.959.254.211,08	3.302.331.021,91

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
(6) Utang Lain-lain	Rp 2.626.477.088,39	Rp 6.276.538,39

Jumlah tersebut merupakan saldo utang lain-lain per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006. Rincian utang lain-lain sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Setoran IWLTKP(Disnaker)	776.536,60	776.536,60
2.	Hasil Penjualan sapi (Disnak)	5.500.000,00	5.500.000,00
3.	Hasil Penjualan gabah (Baketbang)	0,53	0,53
4.	Rekondisi (PU Bina Marga)	1,26	1,26
5.	Utang Jasa Pelayanan (RSU Dr Saiful Anwar)	2.620.200.550,00	-
	Jumlah	2.626.477.088,39	6.276.538,39

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
b) Kewajiban Jangka Panjang	Rp 6.559.051.226,00	Rp -
(1) Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp 6.559.051.226,00	Rp -

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2007. Utang Jangka Panjang Lainnya berasal dari pinjaman RSUD Dr Soetomo kepada Bank Jatim. Utang Jangka Panjang tersebut belum termasuk utang RSUD Dr Saiful Anwar kepada Bank Jatim sebesar Rp10.320.000.000,00 yang menjadi tanggung jawab unit paviliun.

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
7) Ekuitas Dana		
a) Ekuitas Dana Lancar	Rp 1.317.418.268.354,96	Rp 842.815.140.327,49

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

Ekuitas Dana Lancar terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1.281.483.631.783,22	847.309.400.090,89
2.	Pendapatan yang ditangguhkan	271.663.646,60	-
3.	Cadangan Piutang	153.269.178.288,00	102.980.974.975,35
4.	Cadangan Persediaan	52.044.941.410,42	45.706.680.880,00
5.	Dana yang harus disediakan untuk hutang jangka pendek	(169.651.146.773,28)	(153.181.915.618,75)
	Total Ekuitas Dana Lancar	1.317.418.268.354,96	842.815.140.327,49

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1.281.483.631.783,22 terdiri dari:

(1) Kas di Kas Daerah	Rp 1.237.638.636.382,43
(2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 8.588.974.570,00
(3) Kas di Rekening Fungsional Rumah Sakit	<u>Rp 35.256.020.830,79</u>
	Rp 1.281.483.631.783,22

Perbandingan SILPA di Neraca dengan Saldo Kas di Neraca

No	Uraian	SiLPA di Neraca (Rp)	Kas di Neraca (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	1.237.638.636.382,43	1.237.638.636.382,43
2	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	a. Sisa UP disetor 2008	4.672.154.143,00	4.672.154.143,00
	b. PFK Bendahara Pengeluaran	1.530.992.927,00	1.530.992.927,00
	c. Sisa Dana Askeskin (Tak terduga)	2.385.827.500,00	2.385.827.500,00
3	Kas di Rekening Rumah Sakit	35.256.020.830,79	35.256.020.830,79
4	Kas di Bendahara Penerimaan		
	a. Bunga Dana Bergulir yang ditangguhkan di Dinas Perekonomian		220.872.916,60
	b. Bunga Dana Bergulir yang ditangguhkan di Dinas Koperasi dan PKM		4.219.125,00
	c. SP III yang ditangguhkan di Dinas Perhubungan		25.885.857,00
	d. Bunga rekening penampungan Askeskin yang ditangguhkan di RSUD Dr Saiful Anwar		20.685.748,00
	Jumlah	1.281.483.631.783,22	1.281.755.295.429,82

Penjelasan perbedaan SILPA di Neraca dengan Kas di Neraca

SILPA di Neraca	: Rp1.281.483.631.783,22
Kas di Neraca	: <u>Rp1.281.755.295.429,82</u>
Selisih	:(Rp 271.663.646,60)

Terdiri dari:

Bunga Dana Bergulir yang ditangguhkan di Dinas Perekonomian	: 220.872.916,60
Bunga Dana Bergulir yang ditangguhkan di Dinas Koperasi dan PKM	: 4.219.125,00
SP III yang ditangguhkan di Dinas Perhubungan	: 25.885.857,00
Bunga rekening penampungan Askeskin yang ditangguhkan di RSUD Dr Saiful Anwar	: 20.685.748,00
Jumlah	: <u>271.663.646,60</u>

Keterangan

- (1) Bunga Dana Bergulir pada Dinas Perekonomian sebesar Rp220.872.916,60 merupakan penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2007. Jumlah tersebut termasuk Kas di Neraca namun tidak termasuk SILPA di Neraca. Jumlah tersebut dicatat sebagai Pendapatan yang ditangguhkan.
- (2) Bunga Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan PKM sebesar Rp4.219.125,00 merupakan penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2007. Jumlah tersebut termasuk Kas di Neraca namun tidak termasuk SILPA di Neraca. Jumlah tersebut dicatat sebagai Pendapatan yang ditangguhkan.
- (3) Sumbangan Pihak III pada Dinas Perhubungan sebesar Rp25.885.857,00 merupakan penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2007. Jumlah tersebut termasuk Kas di Neraca namun tidak termasuk SILPA di Neraca. Jumlah tersebut dicatat sebagai Pendapatan yang ditangguhkan.
- (4) Bunga rekening penampungan Askeskin di RSUD Dr Saiful Anwar sebesar Rp20.685.748,00 merupakan penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan namun belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2007. Jumlah tersebut termasuk Kas di Neraca namun tidak termasuk SILPA di Neraca. Jumlah tersebut dicatat sebagai Pendapatan yang ditangguhkan.

Perbandingan SILPA di Neraca dengan SILPA di LRA

No	Uraian	SILPA di Neraca (Rp)	SILPA di LRA (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	1.237.638.636.382,43	1.237.638.636.382,43
2	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	a. Sisa UP disetor 2008	4.672.154.143,00	4.672.154.143,00
	b. PFK Bendahara Pengeluaran	1.530.992.927,00	
	c. Sisa Dana Askeskin (Tak terduga)	2.385.827.500,00	
	d. Kas di Dinas Kesehatan (2006)		1.393.331.210,00
3	Kas di Rekening Rumah Sakit	35.256.020.830,79	35.256.020.830,79
	Jumlah	1.281.483.631.783,22	1.278.960.142.566,22

Penjelasan perbedaan SILPA di Neraca dengan SILPA di LRA	
SILPA di Neraca	: Rp1.281.483.631.783,22
SILPA di LRA	: <u>Rp1.278.960.142.566,22</u>
Selisih	: Rp 2.523.489.217,00

Terdiri dari:

- (1) PFK Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.530.992.927,00 merupakan potongan pajak negara yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2007. Jumlah tersebut masih berada di Bendahara Pengeluaran sehingga termasuk SILPA di Neraca dan tidak termasuk SILPA di LRA karena merupakan Penerimaan Non Anggaran;
- (2) Sisa Dana Askeskin sebesar Rp2.385.827.500,00 merupakan sisa dana askeskin di RSUD Dr Saiful Anwar yang belum dikembalikan ke Kas Daerah. Jumlah tersebut termasuk SILPA di Neraca dan tidak termasuk SILPA di LRA;
- (3) Kas di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.393.331.210,00 merupakan kas di bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan yang telah direklasifikasikan menjadi Tuntutan Ganti Rugi. Jumlah tersebut tidak termasuk SILPA di Neraca.

	31 Desember 2007	31 Desember 2006
b) Ekuitas Dana Investasi	Rp 24.994.815.589.876,00	Rp 24.295.233.931.003,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.

Ekuitas Dana Investasi terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
1.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	1.290.066.359.350,00	1.035.046.059.350,00
2.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	23.699.914.950.542,00	23.250.187.871.653,00
3.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	11.393.331.210,00	10.000.000.000,00
4.	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(6.559.051.226,00)	-
	Total Ekuitas Dana Investasi	24.994.815.589.786,00	24.295.233.931.03,00

c) Ekuitas Dana Cadangan

	<u>31 Desember 2007</u>	<u>31 Desember 2006</u>
Diinvestasikan dalam		
dana cadangan	Rp 479.055.408.392,75	Rp 328.276.814.248,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006.



b. Laporan Realisasi Anggaran

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
Pendapatan	Rp 5.133.847.177.458,00	Rp 5.940.048.022.273,61

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 terealisasi sebesar Rp5.940.048.022.273,61, terdiri dari:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
1) Pendapatan Asli Daerah	Rp 3.555.497.177.458,00	Rp 4.164.250.659.986,61
a) Pajak Daerah	Rp 3.143.250.000.000,00	Rp 3.574.886.241.780,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2007, terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	1.483.707.055.565,00
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.256.328.897.050,00
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	800.561.751.098,00
4.	Pajak Air Permukaan	17.009.784.842,00
5.	Pajak Air Bawah Tanah	17.278.753.225,00
	Total Pajak	3.574.886.241.780,00

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
b) Retribusi Daerah	Rp 229.913.773.500,00	Rp 261.100.680.457,77

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan retribusi Daerah Tahun Anggaran 2007, yang terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	205.364.680.813,89
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	855.113.500,00
3.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.235.900.300,00
4.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	13.859.600,00
5.	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	6.492.000,00
6.	Retribusi Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian Hasil Hutan	5.458.712.609,88
7.	Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi Lintas Kabupaten/Kota	24.555.000,00
8.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	23.600.726.722,00
9.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.631.217.372,00
10.	Retribusi Pengelolaan Taman Hutan Rakyat R. Soerjo	474.316.250,00
11.	Retribusi Ijin Trayek	1.137.766.500,00
12.	Retribusi Ijin Perpanjangan Kerja	14.297.339.790,00
	TOTAL RETRIBUSI DAERAH	261.100.680.457,77

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
b) Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Rp 21.000.000.000,00	Rp 22.847.861.448,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Tahun Anggaran 2007 yang terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.588.650.075,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	75.634.792,00
3	Bagi Hasil Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	4.537.943,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	17.882.070.739,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.296.967.899,00
	Jumlah	22.847.861.448,00

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
c) Dana Alokasi Umum	Rp 1.091.155.000.000,00	Rp 1.091.155.000.000,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2007.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
3) Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp 14.195.000.000,00	Rp 19.901.336.118,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2007.

Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa pendapatan hibah yang terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Sumbangan Pihak Ketiga dari ASDP	4.150.191.359,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga dari Perum Perhutani	7.445.966.559,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga dari Jasa Raharja	8.305.178.200,00

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
Belanja	Rp 5.739.064.728.064,00	Rp 5.267.845.347.892,28

1) Belanja Operasi	Rp 3.519.937.236.357,00	Rp 3.263.437.620.434,71
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2007 dianggarkan sebesar Rp3.519.937.236.357,00 dan direalisasikan Rp3.263.437.620.434,71 atau 92,71%.

a) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.210.568.135.064,00 dari anggaran sebesar Rp1.291.809.389.682,00 atau 93,71%;

b) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp1.194.585.857.398,00 dari anggaran sebesar Rp1.357.553.787.621,00 atau 88,00%;

Realisasi tersebut di antaranya terdiri dari pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp725.751.463,00 dan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp3.274.248.537,00 pada RSUD Dr Soetomo.

- c) Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00;
- d) Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00;
- e) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 100%; Belanja hibah sebesar Rp2.000.000.000,00 merupakan belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta.
- f) Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp856.283.627.972,71 dari anggaran sebesar Rp868.574.059.064,00 atau 98,58%. Belanja Bantuan Sosial terdiri dari:
 - (1) Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp118.146.921.458,71;
 - (2) Belanja Bantuan Sosial untuk Peningkatan Pendidikan sebesar Rp128.885.701.000,00;
 - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Keagamaan sebesar Rp16.345.000.000,00;
 - (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp76.775.507.451,00;
 - (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Instansi/Lembaga Daerah/Masyarakat sebesar Rp512.433.504.694,00;
 - (6) Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp2.100.000.000,00;
 - (7) Belanja Bantuan Jaringan dan Instalasi Listrik, Telepon, dan Infrastruktur Lainnya Rp1.596.993.369,00.

Realisasi tersebut di antaranya:

- (1) Realisasi bantuan rehabilitasi sekolah negeri sebesar Rp67.350.000.000,00 yang lebih tepat direalisasikan melalui Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Realisasi bantuan sosial kepada instansi/lembaga daerah/masyarakat sebesar Rp24.646.471.050,00 yang lebih tepat dianggarkan pada belanja program kegiatan SKPD;

	Anggaran	Realisasi
2) Belanja Modal	Rp 703.050.629.137,00	Rp 640.504.302.197,57

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp703.050.629.137,00 dan direalisasikan sebesar Rp640.504.302.197,57 atau sebesar 91,10% terdiri dari.

- a) Belanja Tanah terealisasi sebesar Rp62.055.742.229,00 dari anggaran sebesar Rp70.625.598.263,00 atau sebesar 87,87%;
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp129.212.705.629,00 dari anggaran sebesar Rp144.409.743.598,00 atau sebesar 89,48%;
 - c) Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp250.394.635.516,00 dari anggaran sebesar Rp284.270.514.329,00 atau 88,08%;
- Realisasi tersebut di antaranya:
- (1) Pembangunan bangunan sarana MCK pada lingkungan Pondok Pesantren dan masyarakat sebesar Rp5.636.377.300,00 yang lebih tepat dianggarkan dalam belanja hibah;
 - (2) *Master Plan* dan animasi Anjungan Jatim TMII sebesar Rp342.700.000,00 yang lebih tepat dianggarkan dalam belanja barang.
- d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp194.154.071.715,57 dari anggaran sebesar Rp198.862.079.387,00 atau sebesar 97,63%;
- Realisasi tersebut termasuk pembangunan jalan lingkungan dan jaringan air bersih di lingkungan pondok pesantren dan masyarakat sebesar Rp15.798.637.500,00 yang lebih tepat dianggarkan dalam belanja hibah.
- e) Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp2.417.708.183,00 dari anggaran sebesar Rp2.523.484.000,00 atau 95,81%;
 - f) Belanja Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp2.269.438.925,00 dari anggaran sebesar Rp2.359.209.560,00 atau 96,19%.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
3) Belanja Tidak Terduga	Rp 56.063.183.400,00	Rp 25.002.442.773,00

Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp25.002.442.773,00 dari anggaran sebesar Rp56.063.183.400,00 atau 44,60%. Rincian realisasi Belanja Tak Terduga terdiri dari:

- a) Pengembalian kelebihan pendapatan pajak daerah tahun 2006 sebesar Rp4.505.000,00;
- b) Pengembalian kelebihan setor TP/TGR sebesar Rp2.621.916,00;
- c) Pengembalian kelebihan setor sisa kas tahun anggaran 2006 sebesar Rp16.608.150,00;
- d) Pembayaran Biaya Pelayanan Pasien Askeskin yang tidak ditanggung oleh PT. ASKES sebesar Rp12.000.000.000,00;
- e) Pembayaran bantuan penanganan darurat Prasarana Jalan/Jembatan Akibat Bencana Alam sebesar Rp3.869.634.250,00;

- f) Pembayaran Peningkatan Jalan dan Jembatan Alternatif Lintas Timur Pengalihan Arus Lalu Lintas Ruas Jalan Raya Porong sebesar Rp3.516.000.000,00;
- g) Pembayaran Bantuan untuk Penanganan Mendesak Pasca Musibah Kebakaran Pasar Turi sebesar Rp5.000.000.000,00;
- h) Pembayaran Tambahan Kebutuhan Rambu dan RPPJ pada Ruas Jalan Alternatif Tanggulangin - Porong sebagai akibat bencana lumpur lapindo sebesar Rp1.000.000.000,00.

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
4) Belanja Transfer	Rp 1.460.013.679.160,00	Rp 1.338.900.982.487,00
Transfer dianggarkan sebesar Rp1.460.013.679.160,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.338.900.982.487,00 atau 91,70% terdiri dari:		
a) Transfer/bagi hasil pendapatan ke kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.334.276.267.687,00 dari anggaran sebesar Rp1.452.656.631.160,00 atau 91,85%		
b) Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya terealisasi sebesar Rp4.624.714.800,00 dari anggaran sebesar Rp7.357.048.000,00 atau 62,86%		

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
Pembiayaan	Rp 606.610.881.816,00	Rp 606.757.468.184,89
1) Pembiayaan Penerimaan	Rp 915.023.277.033,00	Rp 915.169.863.401,89
a) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Tahun 2006) sebesar Rp847.306.591.208,89;		
b) Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp67.713.876.943,00 berupa pencairan Dana Cadangan murni untuk ditransfer ke Dana Cadangan Pilkada;		
c) Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp149.395.250,00.		

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>
2) Pembiayaan Pengeluaran	Rp 308.412.395.217,00	Rp 308.412.395.217,00
a) Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp190.000.000.000,00 yang diperuntukkan bagi pembiayaan pelaksanaan Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2008;		
b) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp118.263.000.000,00;		

c) Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp149.395.217,00.

Pembayaran pokok utang tersebut didalamnya terdapat realisasi pembayaran bunga dan jasa bank sebesar Rp7.721.420,14.

Anggaran **Realisasi**

3) Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SILPA) Rp 1.393.331.210,00 Rp 1.278.960.142.566,22

Perbandingan SILPA di LRA dengan Kas di Neraca

No	Uraian	SILPA di LRA (Rp)	Kas di Neraca (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	1.237.638.636.382,43	1.237.638.636.382,43
2	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	a. Sisa UP disetor 2008	4.672.154.143,00	4.672.154.143,00
	b. Dinas Kesehatan (2006)	1.393.331.210,00	
	c. PFK Bendahara Pengeluaran		1.530.992.927,00
	d. Sisa Dana Askeskin (Tak terduga)		2.385.827.500,00
3	Kas di Rekening Rumah Sakit	35.256.020.830,79	35.256.020.830,79
4	Kas di Bendahara Penerimaan		
	a. Bunga Dana Bergulir yang ditangguhkan di Dinas Perekonomian		220.872.916,60
	b. Bunga Dana Bergulir yang ditangguhkan di Dinas Koperasi dan PKM		4.219.125,00
	c. SP III yang ditangguhkan di Dinas Perhubungan		25.885.857,00
	d. Bunga rekening penampungan Askeskin yang ditangguhkan di RSUD Dr Saiful Anwar		20.685.748,00
	Jumlah	1.278.960.142.566,22	1.281.755.295.429,82

Penjelasan Saldo Kas di Neraca dengan SILPA di LRA:

Saldo SILPA di LRA : Rp1.278.960.142.566,22

Saldo Kas di Neraca : Rp1.281.755.295.429,82

Selisih : (Rp 2.795.152.863,60)

Terdiri dari:

Kas di Bendahara Pengeluaran (PFK) : (Rp1.530.992.927,00)

Kas di Bendahara Pengeluaran (Dinas Kesehatan 2006) : Rp1.393.331.210,00

Kas di Bendahara Pengeluaran (Sisa Askeskin) : (Rp2.385.827.500,00)

Kas di Bendahara Penerimaan : (Rp 271.663.646,60)

Jumlah : (Rp2.795.152.863,60)

Keterangan

- (1) Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan tahun 2006 sebesar Rp1.393.331.210,00 tidak termasuk Kas di Neraca karena telah direklasifikasikan menjadi Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Rugi;
- (2) Kas sisa dana Askeskin di RSUD Dr Saiful Anwar termasuk Kas di Neraca karena jumlah Kas tersebut belum dimanfaatkan dan belum dikembalikan ke Kas Daerah;
- (3) Utang PFK/ Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp1.530.992.927,00 termasuk Kas di Neraca tetapi bukan termasuk SILPA di LRA karena jumlah tersebut merupakan hak negara yang belum disetor sampai 31 Desember 2007 dan masih berada di Bendahara Pengeluaran;
- (4) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp271.663.646,60 termasuk Kas di Neraca tetapi tidak termasuk SILPA di LRA. Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2007 sehingga dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

Perbandingan SILPA di LRA dengan SILPA di Neraca

No	Uraian	SILPA di LRA (Rp)	SILPA di Neraca (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	1.237.638.636.382,43	1.237.638.636.382,43
2	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	a. Sisa UP disetor 2008	4.672.154.143,00	4.672.154.143,00
	b. PFK Bendahara Pengeluaran		1.530.992.927,00
	c. Sisa Dana Askeskin (Tak terduga)		2.385.827.500,00
	d. Kas di Dinas Kesehatan (2006)	1.393.331.210,00	
3	Kas di Rekening Rumah Sakit	35.256.020.830,79	35.256.020.830,79
	Jumlah	1.278.960.142.566,22	1.281.483.631.783,22

Penjelasan perbedaan SILPA di LRA dengan SILPA di Neraca

SILPA di LRA	: Rp1.278.960.142.566,22
SILPA di Neraca	: <u>Rp1.281.483.631.783,22</u>
Selisih	:(Rp 2.523.489.217,00)

Terdiri dari:

- (1) PFK Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.530.992.927,00 merupakan potongan pajak negara yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2007. Jumlah tersebut masih berada di Bendahara Pengeluaran sehingga termasuk SILPA di Neraca dan tidak termasuk SILPA di LRA karena merupakan Penerimaan Non Anggaran;

- (2) Sisa Dana Askeskin sebesar Rp2.385.827.500,00 merupakan sisa dana askeskin di RSUD Dr Saiful Anwar yang belum dikembalikan ke Kas Daerah. Jumlah tersebut termasuk SILPA di Neraca dan tidak termasuk SILPA di LRA;
- (3) Kas di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.393.331.210,00 merupakan kas di bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan yang telah direklasifikasikan menjadi Tuntutan Ganti Rugi. Jumlah tersebut tidak termasuk SILPA di Neraca.



c. Laporan Arus Kas

Aktivitas yang tersajikan dalam Laporan Arus Kas adalah aktivitas arus kas masuk dan keluar melalui Kas Daerah. Aktivitas yang dilakukan melalui rekening fungsional Rumah Sakit dikeluarkan dari Laporan Arus Kas dan disajikan dalam Kas di Rekening Fungsional Rumah Sakit.

1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi **Rp 1.290.002.610.628,01**

Arus Kas Masuk	Rp	5.727.068.883.836,72
Arus Kas Keluar	Rp	4.437.066.273.208,71
Arus Kas Bersih	Rp	1.290.002.610.628,01

Arus kas masuk terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah	Rp	3.951.271.521.549,72
b) Pendapatan Transfer	Rp	1.755.896.026.169,00
c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	19.901.336.118,00
Jumlah	Rp	5.727.068.883.836,72

Arus kas keluar terdiri dari:

a) Belanja Pegawai	Rp	1.136.408.311.825,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.080.067.901.520,00
c) Belanja Bunga	Rp	0,00
d) Belanja Subsidi	Rp	0,00
e) Belanja Hibah	Rp	2.000.000.000,00
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp	854.686.634.603,71
g) Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	Rp	1.334.276.267.687,00
h) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	4.624.714.800,00
i) Belanja Tidak Terduga	Rp	25.002.442.773,00

Jumlah **Rp 4.437.066.273.208,71**

2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi **(Rp 618.821.597.739,57)**

Arus Kas Masuk	Rp	3.528.665.807,00
Alliran Kas Keluar	Rp	622.350.263.546,57
Arus Kas Bersih	(Rp	<u>618.821.597.739,57</u>)

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi adalah Penjualan atas Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.528.665.807,00.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi adalah Realisasi Belanja Modal sebesar Rp622.350.263.546,57.

3) Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp	240.549.123.024,00)
Arus Kas Masuk	Rp	67.863.272.193,00
Arus Kas Keluar	Rp	308.412.395.217,00
Arus Kas Bersih	(Rp	240.549.123.024,00)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan terdiri dari:		
a) Pencairan Dana Cadangan	Rp	67.713.876.943,00
b) Penerimaan Kembali Pinjaman	Rp	149.395.250,00
Jumlah	Rp	67.862.272.193,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan terdiri dari:		
a) Pembentukan Dana Cadangan	Rp	190.000.000.000,00
b) Penyertaan Modal	Rp	118.263.000.000,00
c) Pembayaran Pokok Hutang	Rp	149.395.217,00
Jumlah	Rp	308.412.395.217,00
4) Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	-
Arus Kas Masuk	Rp	164.316.039.187,00
Arus Kas Keluar	Rp	164.316.039.187,00
Arus Kas Bersih	Rp	-
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan terdiri dari:		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	Rp	164.316.039.187,00
Jumlah	Rp	164.316.039.187,00
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan terdiri dari:		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	Rp	164.316.039.187,00
Jumlah	Rp	164.316.039.187,00

5) Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	Rp 430.631.889.864,44
Saldo Awal Kas	Rp 811.854.071.190,99
Saldo Akhir Kas di BUD	Rp 1.242.310.790.525,43
Kas di Bendahara Pengeluaran (Belum setor)	Rp 3.916.820.427,00
Kas di Rekening Fungsional Rumah Sakit Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 35.256.020.830,79
Saldo Akhir Kas	Rp 1.281.755.295.429,82
a) Saldo Awal Kas terdiri dari:	
(1) Kas di Kas Daerah	: Rp 810.854.071.190,99
(2) Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp 824.829.470,00
Saldo Awal Kas	: Rp 811.678.900.660,99
b) Saldo Akhir Kas di BUD terdiri dari	
(1) Kas di Kas Daerah	: Rp1.237.638.636.382,43
(2) Kas di Bendahara Pengeluaran (telah disetor ke Kas Daerah)	: Rp 4.672.154.143,00
Saldo Akhir Kas di BUD	: Rp1.242.310.790.525,43
c) Saldo Akhir Kas di Rekening Fungsional Rumah Sakit	: Rp 35.256.020.830,79
d) Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor terdiri dari:	
(1) Sisa Askeskin di RSUD Saiful Anwar	: Rp 2.385.827.500,00
(2) PFK di Bendahara Pengeluaran	: Rp 1.530.992.927,00
Jumlah	: Rp 3.916.820.427,00
e) SILPA (a) + b) + c) + d))	: Rp1.281.483.631.783,22
f) Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari:	
(1) Biro Perekonomian	: Rp 220.872.916,60
(2) Dinas Koperasi dan PKM	: Rp 4.219.125,00
(3) Dinas Perhubungan	: Rp 25.885.857,00
(4) Bunga dana askeskin di RSUD Saiful Anwar	: Rp 20.685.748,00
Jumlah	: Rp 271.663.646,60
g) Saldo Akhir Kas (e) + f)	: Rp1.281.755.295.429,82

6. Penjelasan Atas Informasi Non-Keuangan

a. Dasar Hukum :

Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32)

b. Domisili

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

c. Geografi

Jawa Timur terletak antara 111,0' BT hingga 114,4' BT dan Garis Lintang 7,12" LS dan 8,48 'LS dengan luas wilayah 47.157,72 Km². Secara umum Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi lebih luas hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Propinsi Jawa Timur dan wilayah Kepulauan Madura yang hanya sekitar 10 % saja. Jawa Timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 pulau tak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 Km. Batas-batas wilayah propinsi Jawa Timur sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan, Propinsi Kalimantan Selatan
- 2) Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia
- 3) Sebelah Barat dengan Propinsi Jawa Tengah
- 4) Sebelah Timur dengan Selat Bali / Propinsi Bali

LUAS WILAYAH JATIM

MENURUT PENGGUNAAN THN.2006 (Km²)

PEMUKIMAN / TERBANGUN	:	5.858,83
PERSAWAHAN	:	12.034,46
PERTANIAN TANAH KERING	:	10.332,31
KEBUN CAMPUR	:	913,26
PERKEBUNAN	:	1.842,26

HUTAN	:	12.529,59
RAWA/DANAU WADUK	:	112,35
TAMBAK/KOLAM	:	732,40
PADANG RUMPUT / TANAH KOSONG	:	256,38
TANAH TANDUS / RUSAK / TAMBANG	:	1.350,03
LAIN - LAIN	:	1.192,81

d. Topografi

Tingkat Kemiringan Dilihat dari segi Topografis, sebagian besar wilayah daratan di Jawa Timur (39,89%) tergolong berpermukaan datar dengan tingkat kemiringan 0 - 2%. Sedangkan ketinggian tanah sebagian besar wilayah pada posisi 0 - 100 M diatas permukaan laut dengan jumlah mencapai 41,39% dari total wilayah Jawa Timur. Dengan kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagian besar wilayah berupa dataran rendah.

Tabel 1 Topografi Luas Kemiringan Lahan

Uraian	Luas kemiringan lahan (Ha)
Datar (0 - 2)	1.797.789,19
Bergelombang (3 - 15%)	1.292.207,05
Curam (16 - 40%)	447.043,03
Sangat curam (> 40%)	969.155,20

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat - zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Propinsi Jawa Timur mempunyai 48 gunung dan beberapa diantaranya yang masih aktif antara lain Gunung Kelud, Gunung Semeru yang mencapai ketinggian 3.676 meter, Gunung Lamongan yang merupakan gunung terendah dengan tinggi 1.668 meter dan gunung Bromo yang mulai kelihatan aktifitasnya. Sementara beberapa sungai besar yang aktif ikut mentransfer tanah yang subur diantaranya adalah sungai Brantas, sungai Bengawan Solo, Sungai Madiun, Sungai Konto dan lainnya.

Tabel 2
Topografi Ketinggian Di Atas Permukaan Laut

Uraian	Ketinggian di atas permukaan laut (Ha)
0 - 100 M	1.950.567,16
100 - 500 M	1.723.862,64
500 - 1.000 M	447.043,03
Lebih besar dari 1.000 M	591.541,84

Desa/Kelurahan

Pembagian wilayah administrasi Pemerintah Propinsi Jawa Timur pada tahun 2003 s/d tahun 2007 terbagi dalam 4 (empat) Badan Koordinasi Wilayah/ Pembantu Gubernur, 29 Kabupaten dan 9 Kota serta jumlah kecamatan berjumlah 642 kecamatan. Perwakilan kecamatan sejak tahun 2003 telah ditiadakan, sebelumnya berjumlah 114, dan Kota Administratif Batu sejak tahun 2003 telah menjadi Kota, sedang Kota Administratif Jember berdasarkan peraturan perundangan telah dicabut dengan demikian Jember hanya sebagai Kabupaten. Jml. kelurahan sebanyak 785 Kelurahan dan Desa sebanyak 7.680 desa.

Tabel 6 Pembagian Wilayah Administrasi

Uraian	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Badan Koordinasi Wilayah	4	4	4	4	4	4
Jumlah Kabupaten	29	29	29	29	29	29
Jumlah Kota	9	9	9	9	9	9
Jumlah Kecamatan	642	642	642	642	657	657
Jumlah Kelurahan	784	784	784	784	784	784
Jumlah Desa	7.715	7.715	7.715	7.715	8.484	8.484

PEMERINTAHAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom, termasuk di dalamnya adalah Propinsi Jawa Timur. Sesuai ketentuan UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbarui dengan UU nomor 32 tahun 2004, lembaga eksekutif di Pemerintah Propinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, Gubernur membentuk perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Propinsi, Dinas, Badan dan Kantor. Sekretariat Daerah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Propinsi dan 4 orang Asisten.

Susunan instansi perangkat daerah Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Propinsi

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Biro Kerjasama
3. Biro Hukum
4. Biro Kesejahteraan Rakyat
5. Biro Mental Spiritual
6. Biro Perekonomian
7. Biro Administrasi Pembangunan
8. Biro Organisasi
9. Biro Kepegawaian
10. Biro Keuangan
11. Biro Perlengkapan
12. Biro Umum
13. Sekretariat DPRD

Dinas

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Perkebunan
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Kehutanan
8. Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
9. Dinas Peternakan
10. Dinas Tenaga Kerja

11. Dinas Pariwisata
12. Dinas Pendapatan
13. Dinas Kependudukan
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15. Dinas Kepemudaan dan keolahragaan
16. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
17. Dinas Perikanan dan Kelautan
18. Dinas Informasi dan Komunikasi
19. Dinas Pemukiman
20. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
22. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Badan

1. Badan Arsip
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
4. Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi
5. Badan Perpustakaan
6. Badan Kesatuan Bangsa
7. Badan Ketahanan Pangan
8. Badan Pengawasan
9. Badan Pengelolaan Data Elektronik
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat
11. Badan Penelitian dan Pengembangan
12. Badan Penanaman Modal
13. Badan Koordinasi Wilayah I Madiun
14. Badan Koordinasi Wilayah II Bojonegoro
15. Badan Koordinasi Wilayah III Malan
16. Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan

Kantor

1. Kantor Kas Daerah
2. Kantor Perwakilan Propinsi Jawa Timur
3. Kantor Polisi Pamong Praja

DPRD

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, susunan pemerintah daerah otonom meliputi DPRD sebagai lembaga legislatif dan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif. Sesuai ketentuan UU Nomor 32 tahun 12004 tentang Pemerintah Daerah, Untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPRD sebagai lembaga legislatif dibentuk unsur pimpinan, komisi-komisi, panitia dan fraksi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. Sistem Ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah Daerah Propinsi. Sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Di Daerah Propinsi Jawa Timur terdapat 38 Daerah, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Nama Daerah Kabupaten/Kota itu adalah :

- 1 Kota Madiun
- 2 Kabupaten Madiun
- 3 Kabupaten Ponorogo
- 4 Kabupaten Magetan
- 5 Kabupaten Pacitan
- 6 Kabupaten Ngawi
- 7 Kota Kediri
- 8 Kabupaten Kediri
- 9 Kota Blitar
- 10 Kabupaten Blitar
- 11 Kabupaten Trenggalek
- 12 Kabupaten Tulungagung

- 13 Kabupaten Nganjuk
- 14 Kota Malang
- 15 Kabupaten Malang
- 16 Kota Batu
- 17 Kota Pasuruan
- 18 Kabupaten Pasuruan
- 19 Kota Probolinggo
- 20 Kabupaten Probolinggo
- 21 Kabupaten Lumajang
- 22 Kabupaten Bojonegoro
- 23 Kabupaten Tuban
- 24 Kabupaten Lamongan
- 25 Kota Surabaya
- 26 Kota Mojokerto
- 27 Kabupaten Mojokerto
- 28 Kabupaten Gresik
- 29 Kabupaten Jombang
- 30 Kabupaten Sidoarjo
- 31 Kabupaten Pamekasan
- 32 Kabupaten Bangkalan
- 33 Kabupaten Sampang
- 34 Kabupaten Sumenep
- 35 Kabupaten Jember
- 36 Kabupaten Situbondo
- 37 Kabupaten Bondowoso
- 38 Kabupaten Banyuwangi

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

3. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan LKPD TA 2007 meliputi pengujian atas:

- a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern, termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi dalam Neraca per 31 Desember 2007, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- e. Tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah Daerah atas Hasil Pemeriksaan BPK sebelumnya.

4. Standar Pemeriksaan

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK Tahun 2007.

5. Metode Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan yang digunakan adalah pemeriksaan dengan pendekatan berdasarkan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan kegiatan yang akan menentukan area risiko penting yang seharusnya menjadi fokus pemeriksaan untuk meyakinkan pencatatan yang memadai di laporan keuangan.

Dalam menganalisis dan menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini.

- a. Memahami dan menguji sistem akuntansi dan pelaporan yang dipakai dan diterapkan oleh Pemerintah saat ini apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Pemerintah;
- b. Menganalisis proses akuntansi dan pelaporan instansi, termasuk pengendalian yang diterapkan untuk mengurangi risiko salah saji dan kesalahan yang disengaja;
- c. Menelaah kecukupan pengendalian intern yang berhubungan dengan sistem akuntansi dan pelaporan;
- d. Menelaah keakuratan, kelengkapan, keberadaan, penilaian, pisah batas, kepemilikan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan pelaporan.

Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, kami juga melakukan pemantauan atas tindak lanjut dari setiap permasalahan yang ditemui dalam pemeriksaan sebelumnya.

6. Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 7 April dan berakhir pada tanggal 25 Mei 2008.

7. Objek Pemeriksaan

Objek pemeriksaan BPK adalah Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun 2007, yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2007
- b. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Periode Tahun 2007;
- c. Laporan Arus Kas untuk Periode Tahun 2007;
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

8. Kendala Pemeriksaan

Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa mengalami kendala yaitu lambatnya respon dari auditee dalam penyerahan data dan dokumen yang diperlukan.

